



PANDUAN

**PENGEMBANGAN DAN PENYUSUNAN
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI (KPT)
PENDEKATAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK)
DAN PENDIDIKAN BERBASIS CAPAIAN (PBC)**

KBK

PBC

KPT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
2012**

Kata Pengantar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Menindaklanjuti PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khusus pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menerbitkan buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Buku ini merupakan acuan ringkas yang dapat memfasilitasi dan memberdayakan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana dan diploma dalam upaya penyusunan kurikulum yang mengacu kepada capaian pembelajaran dan kompetensi.

Buku panduan tidak dirancang sebagai manual penyusunan kurikulum, tetapi bersifat ringkas dan dimaksudkan sebagai pemberi inspirasi, motivasi, dan kepercayaan diri bahwa setiap perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana dan diploma mampu menyusun kurikulum merujuk capaian pembelajaran (*learning outcomes*) ataupun kemampuan (kompetensi) yang berkualitas dalam tingkatan dan kapasitas masing-masing.

Pengguna buku ini diharapkan dapat melakukan refleksi dan *re-invent* pada program studi masing-masing melalui kokreasi bersama sivitas akademika dan pemangku kepentingan bersangkutan. Dengan pendekatan refleksi dan reka cipta ulang diyakini bahwa para pembaca yang sukses melakukan implementasi akan dikenal sebagai agen perubahan kurikulum yang memenuhi kompetensi sesuai dengan *scientific vision* dan kebutuhan dunia kerja.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dalam memperkaya pengetahuan, wawasan, dan khususnya mengenai perbaikan kurikulum perguruan tinggi di Indonesia.

Akhir kata, walaupun masih banyak kekurangan, buku ini, diharapkan dapat digunakan sebagai landasan perubahan yang sangat bermanfaat menuju pendidikan berkualitas.

Semoga buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi.

Jakarta, Desember 2012

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Djoko Santoso

Kata Pengantar

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kurikulum merupakan cetak biru dari keseluruhan proses pembelajaran pada sistem pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Menyadari akan hal ini, Dikti melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan memprogramkan secara khusus kegiatan yang mampu mendukung dan mendorong pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Akan tetapi, karena penyusunan kurikulum merupakan hak otonom dari perguruan tinggi, keterlibatan Dikti hanya sampai sejauh mengembangkan buku rujukan dalam pengembangan kurikulum. Untuk usaha inilah, disusun buku **Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)**.

Buku ini berisi serangkaian bab yang dimulai dengan hal yang melatarbelakangi perubahan kurikulum dan proses menuju perubahan ke kurikulum pendidikan tinggi yang berkualitas. Kemudian, dilanjutkan dengan pemaparan implementasi dan evaluasi kurikulum pada pendidikan tinggi, baik di universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik maupun akademi.

Buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang realistis tentang KPT dikorelasikan terhadap capaian pembelajaran (*learning outcomes =LO*). Kritik dan saran diharapkan dalam rangka perbaikan pada buku berikutnya.

Semoga buku kecil ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Jakarta, Desember 2012

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Illah Sailah

TIM PENYUSUN

Illah Sailah (Ditjen Dikti)

Iwan Kunaifi (ITB)

I Made Suparta (UNUD)

S.P. Mursid (Polban)

Endrotomo (ITS)

Sylvi Dewajani (UGM)

Samsul Arifin (ITS)

Ridwan Roy (Ditjen Dikti)

Evawani (Ditjen Dikti)

Zairil (Ditjen Dikti)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	i
Kata Pengantar Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan	ii
Tim Penyusun	iii
DAFTAR ISI	iv
1. DISKUSI AWAL	6
1.1. Alur Menyusun Kurikulum	6
1.2. Penggunaan Istilah <i>Learning outcomes</i> (LO), Capaian Pembelajaran dan Kompetensi	9
1.3. Kualifikasi Capaian Pembelajaran	13
1.4. Penyusunan Kompetensi pada Program Studi Merujuk Diskriptor KKNI	16
1.5. Muatan Kurikulum yang Memberdayakan	17
2. KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI	19
2.1. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia	19
2.2. Peran Kurikulum di dalam Sistem Pendidikan Tinggi	21
3. ALASAN PERLUNYA PERUBAHAN.....	255
4. LANGKAH LANGKAH PENYUSUNAN KURIKULUM	32
5. IMPLEMENTASI DALAM PEMBELAJARAN.....	51
5.1. Pengantar Kearah perubahan Pembelajaran	51
5.2. Kondisi Pembelajaran di Perguruan Tinggi saat ini	522
5.3. Perubahan dari TCL ke arah SCL	555
5.4. Metode Pembelajaran SCL	611
6. RAGAM METODE PEMBELAJARAN SCL.....	633
6.1. Small Group Discussion	634
6.2. Simulasi/ Demonstrasi	64
6.3. Discovery Learning (DL)	644
6.4. <i>Self-Directed Learning</i> (SDL)	643
6.5. <i>Cooperative Learning</i> (CL)	655
6.6. <i>Collaborative Learning</i> (CbL)	666
6.7. <i>Contextual Instruction</i> (CI).....	666
6.8. <i>Project-Based Learning</i> (PjBL).....	677
6.9. <i>Problem-Based Learning/Inquiry</i> (PBL/I).....	677
<i>Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi</i>	iv

7. MENYUSUN RANCANGAN PEMBELAJARAN	700
8. PENILAIAN DALAM PEMBELAJARAN	777
8.1 Rubrik Deskriptif	799
8.2. Rubrik Holistik.....	81
8.3. Cara membuat Rubrik	81
9. MATERI KHUSUS UNTUK PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI	
9.1. Pendidikan Karakter di Pendidikan Tinggi	89
10. Penutup	899
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

DISKUSI AWAL

Sebelum diskusi dan pembahasan dituliskan lebih mendalam, perlu bersepakat atau setidaknya bersepaham mengenai makna kurikulum. Diketahui bahwa definisi kurikulum beragam mulai dari yang dituliskan di kamus sampai pada telaah para peneliti dan ahli pendidikan. Namun, untuk pemahaman awal, diambil definisi kurikulum dari perangkat hukum yang mengatur pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Definisi menurut Kepmen 232 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi. Definisi kurikulum lainnya akan dibahas pada bab selanjutnya.

1.1 Alur Menyusun Kurikulum

Penulisan buku ini berawal dari tujuan untuk membantu siapa saja yang berminat dalam pengembangan dan penyusunan kurikulum, khususnya kurikulum pada pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, dengan memberikan serangkaian pengetahuan, diskusi, dan uraian mengenai kurikulum dan informasi bermanfaat lain yang berhubungan dengan kurikulum. Berbagai telaah dan diskusi yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, pengembangan kemampuan manusia, kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, peraturan pendidikan, teori pendidikan, konsep kurikulum dan pembelajaran, serta teknik penyusunan kurikulum maupun pembelajaran, dibahas sesuai dengan kepentingannya agar pembaca mendapatkan bahan yang cukup untuk memahami, mengembangkan, menyusun, dan menerapkan kurikulum pada sistem pendidikan.

Pembahasan diselaraskan dengan urutan dalam penyusunan kurikulum, sehingga diharapkan akuisisi pengetahuan menjadi runtut sampai pada tahapan siap, atau setidaknya paham bagaimana kurikulum dikembangkan dan disusun. Diagram alir berikut menggambarkan urutan dalam penyusunan kurikulum pada program studi di perguruan tinggi.



Diagram Alir Penyusunan Kurikulum

Setidaknya ada tujuh tahapan dalam penyusunan kurikulum, masing-masing adalah sebagai berikut.

a. Mengetahui posisi program studi dalam konstelasi sistem pendidikan

Pada tahap pertama ini dibahas sistem pendidikan secara umum baik yang berlangsung di Indonesia maupun konsep pendidikan yang diakui dunia. Paradigma pendidikan yang dikembangkan oleh IBE-UNESCO, ISCED, *Bologna Process* ataupun pendapat para pakar menjadi bagian dari bahasan. Secara khusus juga akan dibahas sistem pendidikan tinggi di Indonesia sehingga perspektif pendidikan yang akan melatarbelakangi pengembangan kurikulum menjadi lebih lengkap dan luas.

b. Menentukan spesifikasi program.

Kurikulum disusun pada tingkat program studi. Jika merujuk peraturan pendidikan, definisi program studi berkembang mulai dari satuan terkecil penyelenggara pendidikan bergeser

ke program pembelajaran beserta perencanaan sumber daya untuk mendukungnya. Apapun definisinya, pada praktiknya proses pembelajaran berlangsung di dalam program studi. Jenjang capaian pembelajaran ditentukan di tingkat program studi. Pada tahap ini akan dirujuk kualifikasi capaian pembelajaran dalam KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang sedang dikembangkan di Indonesia. Muatan pembelajaran yang meningkatkan kualitas proses pendidikan turut disertakan seperti halnya pembangunan karakter bangsa yang positif, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*education for sustainable development*), dan juga kewirausahaan.

c. Mengidentifikasi pengetahuan dan kemampuan lulusan

Saat ini ada tiga jenis pendidikan tinggi, yakni vokasi, profesi, dan akademik. Penjenisan ini sepenuhnya merujuk pada peraturan; jadi, bukan sepenuhnya berdasarkan pada kajian ilmiah yang didukung oleh naskah akademis yang sah. Namun, penjenisan ini dapat digunakan untuk mengkerangkai diskusi mengenai kelompok pengetahuan dan kemampuan lulusan dari berbagai program studi yang memiliki kekhasan tertentu, seperti program studi dari politeknik yang memiliki kekhasan pada terapan dibanding dengan program studi pada universitas yang lebih kepada keilmuan. Kelompok pengetahuan dan kemampuan yang perlu dikuasai oleh lulusan dapat dipilah berdasar pada area pengaruhnya pada profil lulusan yang mencakup kelompok utama dan pendukung. Kelompok pengetahuan dan kemampuan utama memberikan pengaruh dan ciri khusus pada lulusan sesuai dengan bidang studinya, sedangkan kelompok pendukung akan melengkapi profil lulusan dengan keunggulan yang dipilih oleh program studi atau institusi.

d. Mengidentifikasi bahan kajian dan pelajaran

Agar lulusan dari program studi dapat menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran dan profilnya, selama proses pembelajarannya harus disiapkan bahan kajian dan pelajaran yang sesuai. Penyiapan bahan kajian dan pelajaran harus dapat mengisyaratkan kedalaman capaian pembelajarannya. Hal ini bersesuaian dengan seberapa jauh pengetahuan dan kemampuan yang hendak dikuasai.

e. Membentuk mata kuliah

Bahan kajian ataupun materi ajar pada akhirnya harus diakuisisi/dikuasai oleh mahasiswa dalam proses pembelajarannya secara terorganisasi melalui mata kuliah. Dengan kata lain,

mata kuliah adalah konsekuensi adanya bahan kajian atau pelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Dapat juga dianggap bahwa mata kuliah merupakan wadah dari bahan kajian. Kedalaman bahan kajian selanjutnya akan menentukan besarnya sks setiap mata kuliah. Pada tahap penentuan maka kuliah ini juga dilakukan proses penataan persemester setiap matakuliah tersebut sesuai dengan urutan kapan proses pembelajaran terjadi.

f. Proses pembelajaran

Efektivitas akuisisi atau penguasaan bahan kajian oleh para mahasiswa akan sangat terpengaruh pada metode dan media belajar selama proses pembelajaran. Pemilihan metode dan media belajar dipengaruhi oleh pengetahuan dan kemampuan dari bahan kajian yang harus dikuasai mahasiswa.

g. Penilaian

Proses penilaian merupakan bagian penting untuk mengevaluasi atau mengetahui telah sampai seberapa jauh bahan kajian ataupun pelajaran dikuasai oleh mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Penilaian/evaluasi mencakup evaluasi terhadap capaian hasil mahasiswa dan evaluasi terhadap efektivitas proses pembelajaran yang telah diselenggarakan.

Tujuh langkah proses pengembangan dan penyusunan kurikulum ini menjadi dasar pembahasan dalam buku selanjutnya.

1.2 Penggunaan Istilah *Learning outcomes* (LO), Capaian Pembelajaran, dan Kompetensi

Pembahasan pengembangan dan penyusunan kurikulum akan secara intensif menggunakan istilah *learning outcomes* (LO), capaian pembelajaran, dan kompetensi. Ketiga istilah ini seringkali memiliki maksud yang sama, tetapi dalam beberapa penggunaan tertentu dapat memiliki makna yang khusus yang sedikit berbeda satu terhadap lainnya.

Istilah *learning outcomes* (LO) pada awalnya dikenal dalam perkuliahan di bidang ilmu pendidikan sebagai kajian untuk mengenali hasil belajar siswa setelah melakukan proses pembelajaran pada satu topik tertentu. Namun, pada dekade terakhir ini istilah LO mulai digunakan sebagai tujuan dalam menyelenggarakan pendidikan.

Berbagai literatur yang membahas *learning outcomes* (LO) memberikan beragam cara menyampaikannya definisinya, tetapi memiliki maksud yang kurang lebih sama. Misalnya dalam *The Jomtien Declaration* pada tahun 1990 dan ditindaklanjuti pada *Framework for Action* yang diadopsi dalam *the World Education Forum* di Dakar, Senegal pada April 2000, LO dinyatakan sebagai “*the particular knowledge, skill or behavior that a student is expected to exhibit after a period of study*”. Literatur lainnya mengartikan LO sebagai “*learning outcomes are statements that specify what learners will know or be able to do as a result of a learning activity. Outcomes are usually expressed as knowledge, skills, or attitudes*”. Ada juga yang mendefinisikan sebagai “*learning outcomes are statements of a learning achievement and are expressed in terms of what the learner is expected to know, understand and be able to do on completion of the award or module. They may also include attitudes, behaviours, values and ethics*”.

Sebagai konsep pendidikan, LO diadopsi dalam sistem pendidikan berbasis *outcomes* atau tepatnya *Outcomes Based Education* (OBE). Metode OBE sempat populer di Amerika Serikat pada tahun 1980-an sampai awal 1990-an. Dikenal juga sebagai *mastery education*, *performance-based education*, atau dengan nama lain yang mirip. Penerapannya di Amerika Serikat difasilitasi oleh Texas Assessment of Academic Skills yang dimulai pada Tahun 1991. Negara lain yang menerapkannya, misalnya, Western Australia dan juga Afrika Selatan.

Indonesia mengenal *learning outcomes* pada saat KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang dikembangkan pada awal tahun 2010 oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi yang mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam naskah KKNi *learning outcomes* diterjemahkan sebagai capaian pembelajaran. Dengan demikian capaian pembelajaran adalah padanan *learning outcomes* dalam bahasa Indonesia sehingga makna dan penggunaannya dalam diskusi pendidikan diperlakukan sama. Walaupun demikian, capaian pembelajaran memiliki definisi hukum sebagai “hasil dari proses belajar melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman kerja”. Sementara itu **capaian pembelajaran** dalam naskah akademik KKNi merupakan “internasionalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, keterampilan, afeksi, dan

kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja”.

Jika diperhatikan secara cermat, definisi capaian pembelajaran mengalami perluasan jika dibandingkan dengan definisi *learning outcomes*. Perluasan makna itu khususnya dalam penambahan cara menuju capaian pembelajaran melalui proses pendidikan atau melalui pengalaman kerja. Dengan demikian, capaian pembelajaran bukan istilah yang khas digunakan untuk pendidikan saja, tetapi juga dari proses belajar lainnya sejauh para pembelajarnya dapat menginternalisasi dan mengakumulasikan pelajarannya. Definisi capaian pembelajaran bahkan mencakup internalisasi kompetensi yang dalam buku ini akan menjadi istilah dalam pendidikan dan pengembangan kurikulum yang paling sering disebut dan dipergunaan.

Kata kompetensi di Indonesia mendapatkan popularitasnya pada saat diperkenalkan sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dalam kamus, kompetensi merupakan terjemahan dari *competency* yang merupakan kata benda dari *competence*. *Competence* diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia sebagai kemampuan, kecakapan, bahkan diartikan juga sebagai kewenangan. Kata kompetensi telah diterima juga sebagai kosa kata dalam bahasa Indonesia, sehingga kata kompetensi dapat dipergunakan secara langsung tanpa harus diterjemahkan kedalam kata kemampuan, kecakapan atau kewenangan. Dengan kata lain, menyebut kompetensi akan sama artinya dengan menyebut kemampuan atau sinonim lainnya.

Kompetensi memiliki arti khusus dalam dunia pembelajaran. Sebagaimana diketahui, proses pembelajaran dapat diselenggarakan melalui beragam moda. Setidaknya hal itu dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, ataupun selama melakukan pekerjaan tertentu.

Dalam dunia kerja dan pelatihan, kompetensi memiliki beberapa definisi yang umumnya merujuk pada kemampuan melakukan pekerjaan tertentu. Berikut kutipan beberapa definisi kompetensi.

- *Competency models that identify the skills, knowledge, and characteristics needed to perform a job..... (A. D. Lucia & R. Lepsinger / Preface xiii)."*

- *Competency comprises knowledge and skills and the consistent application of that knowledge and skills to the standard of performance required in employment. (Competency Standards Body Canberra 1994)*
- *Competency is combination of knowledge, skills and abilities to perform them in the job context which are expected by related industries (National Vocational Qualification UK)*

Pencapaian akhir dari penguasaan kompetensi dalam pelatihan dan dunia kerja ini adalah untuk dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Namun, proses pembelajarannya merupakan usaha untuk mengakuisisi/menguasai pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skills*), dan juga kebiasaan (*abilities*). Bandingkan hal ini dengan *learning outcomes* (LO), tentu tidak jauh berbeda.

Lebih lengkap lagi kompetensi dapat dikutipkan dari naskah akademik KKNi yang mengartikan kompetensi sebagai akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya. Definisi kompetensi pada naskah akademik KKNi mengalami proses penyempitan sehingga menjadi terkerangkai untuk melakukan tugas dan pekerjaan tertentu. Hal itu dapat dipahami karena KKNi merupakan konsep kualifikasi dalam bekerja sehingga penekanan pada dunia kerja menjadi orientasi utamanya.

Makna kompetensi menjadi relatif berbeda pada sistem pendidikan tinggi khususnya merujuk Kepmen (Keputusan Menteri) Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengembangan dan penyusunan kurikulum. Dalam Kepmen itu kompetensi diartikan sebagai "seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu".

Pengertian kompetensi sebagaimana dikutip dari Kepmen di atas tidak segera tampak komponen penyusunnya sehingga pengertian dari definisi tersebut menjadi relatif kabur. Pengertian menjadi lebih mudah dipahami setelah menggabungkannya dengan elemen kompetensi yang menjadi komponen penyusunnya.

Elemen tersebut adalah

- a. landasan kepribadian;
- b. penguasaan ilmu dan keterampilan;
- c. kemampuan berkarya;
- d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan
- e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Menarik bahwa elemen kompetensi dalam pendidikan tinggi merupakan uraian lebih luas daripada *learning outcomes*. Hal ini tidak mengherankan mengingat elemen kompetensi pada Kepmen nomor 045/U/2002 tersebut diadopsi dari *learning outcomes* yang disusun dalam “The Four Pillars of Educations in the 21st Century” yang dikeluarkan oleh UNESCO.

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa ketiga istilah *learning outcomes* (LO), capaian pembelajaran, dan kompetensi memiliki kesamaan makna yang dalam buku ini dapat dipergunakan secara bersamaan dan saling menggantikan tanpa kehilangan substansi.

Adakalanya kompetensi dapat diartikan sebagai hasil dari capaian pembelajaran. Dengan maksud bahwa seseorang pembelajar diharapkan menyelesaikan pendidikan atau pelatihannya sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, dengan diselesaikan dan diperolehnya capaian pembelajaran tersebut, pembelajar dapat menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu.

1.3 Kualifikasi Capaian Pembelajaran

Langkah pertama dalam mengembangkan dan menyusun kurikulum dimulai dari menentukan program studi (bidang studinya) dan jenjang (level) dari program studi tersebut. Bidang studi dipilih berdasar pada studi kelayakan dari kebutuhan masyarakat, sedangkan jenjang program studi dapat mengacu kualifikasi capaian pembelajaran yang telah dikembangkan dalam konsep KKNI. KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi level 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi level 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Penetapan level 1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif terhadap kondisi

ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari kebutuhan penghasil (*supply push*) dan pengguna (*demand pull*) tenaga kerja. Diskriptor setiap jenjang (level) kualifikasi juga disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi negara secara menyeluruh, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, dan hukum yang setara, serta aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika, yaitu komitmen untuk tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, dan bahasa di setiap jalur pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia.

Di dalam pengembangannya, KKNi diposisikan sebagai penyetaraan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan di luar ranah Kemdiknas, pengalaman kerja, atau jenjang karier di tempat kerja. Secara skematik pencapaian setiap jenjang atau peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi pada KKNi dapat dilakukan melalui empat jejak jalan (*pathways*) atau kombinasi dari keempatnya. Jejak jalan tersebut terdiri dari jejak jalan melalui pendidikan formal, pengembangan profesi, peningkatan karir di industri/dunia kerja atau akumulasi pengalaman individual.

Dengan pendekatan tersebut maka KKNi dapat dijadikan rujukan oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan SDM di dalam lingkungannya atau oleh masyarakat luas untuk perencanaan karier individual. Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNi disusun oleh tiga parameter utama yaitu (a) **keterampilan kerja**, (b) **cakupan keilmuan/pengetahuan yang harus dikuasai**, (c) **tingkat kewenangan/hak dan tanggung jawab (manajerial)**, serta **sikap khusus** (seperti pada gambar di bawah ini). Ketiga parameter yang terkandung dalam tiap-tiap jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor KKNi. Dengan demikian, ke-9 jenjang KKNi merupakan deskriptor yang menjelaskan hak, kewajiban, dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahliannya.

PARAMETER DAN UNSUR DESKRIPSI KKNI	
PARAMETER DESKRIPSI	Unsur-unsur deskripsi
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	Kemampuan di bidang yang terkait
	Metode/cara yang digunakan
	Tingkat kualitas hasil
	Kondisi/ standar proses
PENGETAHUAN/ KEILMUAN YANG DIKUASAI	Lingkup kajian dan cabang ilmu
	Peran yang bisa dilakukan
HAK DAN TANGGUNG JAWAB MANAJERIAL	Lingkup kewenangan dan tanggung jawab
	Sikap khusus yang dibutuhkan

Uraian tentang parameter pembentukan setiap Deskriptor KKNi adalah sebagai berikut.

- a. **Kemampuan kerja** atau kompetensi merupakan kemampuan dalam ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif yang tercermin secara utuh dalam perilaku atau dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga dalam menetapkan tingkat kompetensi seseorang dapat ditilik lewat unsur - unsur dari kemampuan dalam ketiga ranah tersebut. Pernyataan kemampuan ini tercakup di dalamnya cara/metode yang digunakan, kondisi, serta tingkat kualitas hasil yang harus dicapai. Makin tinggi tingkat kualifikasi dalam KKNi maka kemampuan ini dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan metode yang harus dikuasai dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, termasuk di dalamnya adalah keahlian intelektual (*intellectual skills*).
- b. **Cakupan keilmuan/pengetahuan** merupakan rumusan tingkat keluasan, kedalaman, dan kerumitan/kecanggihan pengetahuan tertentu yang harus dimiliki sehingga makin tinggi kualifikasi seseorang dalam KKNi ini dirumuskan dengan makin luas, makin dalam, dan makin canggih pengetahuan/keilmuan yang dimilikinya. Dengan penguasaan bidang keilmuan/pengetahuan ini dapat dinyatakan peran yang dapat dilakukannya.
- c. **Hak/kewenangan dan tanggung jawab (manajerial)** merumuskan kemampuan manajerial seseorang dalam melakukan pekerjaan yang didalamnya tercakup hak, tanggung jawab, dan

sikap yang dipersyaratkan dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan dalam bidang kerja tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, internalisasi dan akumulasi ketiga parameter yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur atau melalui pengalaman kerja disebut **capaian pembelajaran**.

1.4 Penyusunan Kompetensi pada Program Studi Merujuk Diskriptor KKNI

Kompetensi merupakan parameter penting untuk mengenali capaian pembelajaran dari peserta pendidikan tinggi. Dengan menyusun pernyataan kompetensi pada setiap program studi yang diselenggarakan di perguruan tinggi, akan diperoleh rujukan bagi program studi tersebut dalam merencanakan dan menyelenggarakan proses pembelajaran yang tepat. Dengan demikian, pernyataan kompetensi program studi akan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Mengingat pentingnya pernyataan kompetensi dalam menyusun kurikulum pada tingkat program studi, perlu dilakukan usaha penyusunan secara sistematis dan presisi sehingga diperoleh dokumen kompetensi yang valid dan sah sebagai rujukan.

Pola pengembangan kompetensi program studi ini adalah dengan merujuk diskriptor KKNI yang disesuaikan dengan kualifikasi dan jenjang pendidikannya. Setiap dokumen kompetensi program studi yang akan disusun pertama kali diserahkan dulu pada kelompok atau asosiasi dari bidang ilmu terkait yang memahami arah capaian pembelajaran dan kemampuan akhir dari lulusan program studi tersebut. Dengan kerangka kerja merujuk KKNI, asosiasi selanjutnya bekerja dan berdiskusi untuk menyusun draf kompetensinya. Tim penyusun kurikulum selanjutnya melakukan uji kecocokan antara draf pernyataan kompetensi yang disusun dengan diskriptor KKNI sesuai dengan kualifikasinya. Proses penyusunan dokumen kompetensi ini dapat digambarkan dalam diagram berikut.

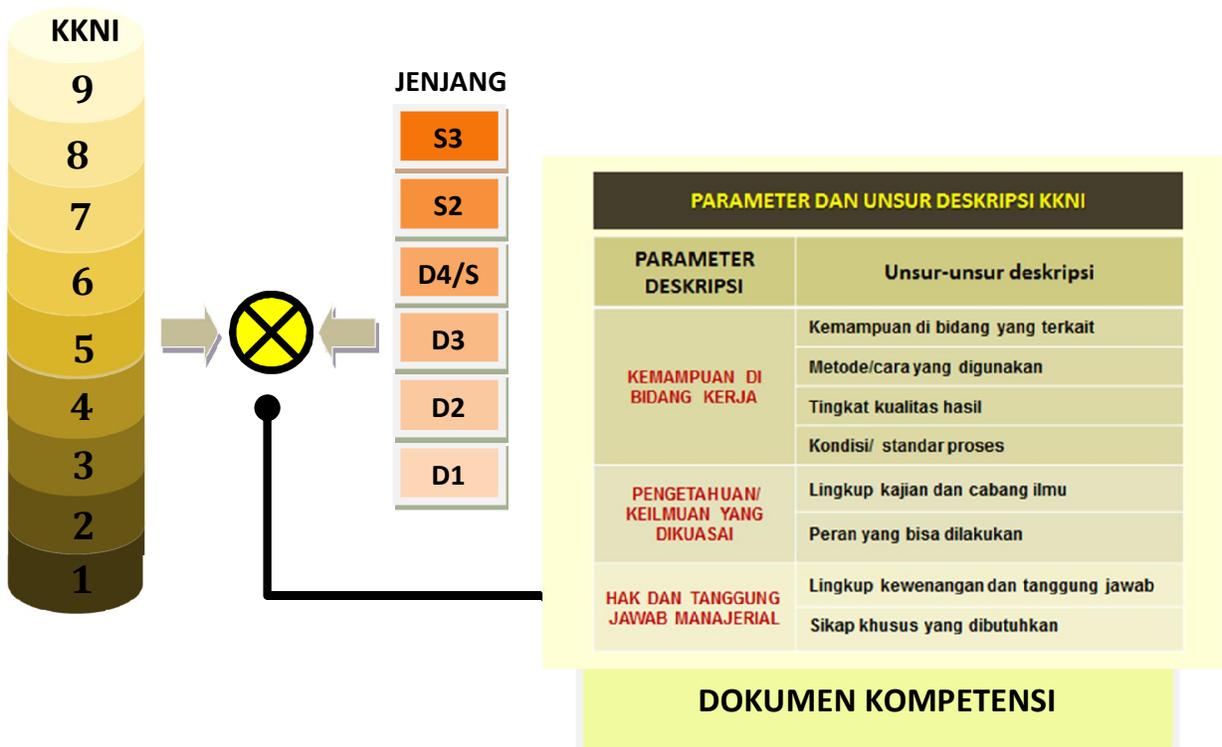


DIAGRAM PENYUSUNAN KOMPETENSI

Dengan penggunaan pola penyusunan secara terstruktur sebagaimana digambarkan pada diagram, diperoleh dokumen kompetensi lulusan yang utuh yang dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam mengembangkan dan menyusun kurikulum.

1.5. Muatan Kurikulum yang Memberdayakan

Menurut penelitian HRD Astra dan peneliti lainnya dari berbagai negara menyimpulkan bahwa keberhasilan seorang pembelajar menerapkan capaian pembelajarannya di dalam kerja kehidupan profesionalnya 80% disebabkan *softskill*. Artinya, pelajaran yang diperoleh di kelas melalui kuliah, atau *hard skill*, hanya menyumbang 20% pada keberhasilan tersebut. Jadi, masih perlukah pendidikan melalui perkuliahan?

Jawabannya sangat diperlukan. Alasan pertama adalah pernyataan berikut yang dikutip kembali dari *The Jomtien Declaration*, yakni *education systems across the world are based on the principle that education quality is defined by its contribution to the development of*

cognitive skills and behavioral traits, attitudes and values that are judged necessary for good citizenship and effective life in the community. Over the last 10 years growth research has been able to demonstrate that the quality of education, has a statistically significant and important positive economic effect and that ignoring the quality of education limits economic growth. Ringkasnya, jika bangsa Indonesia ingin maju, diperlukan pendidikan yang berkualitas.

Alasan kedua, *softskill* tidak akan dapat diperoleh tanpa belajar *hardskill* yang terencana dengan baik. Jika dianalogikan secara ekstrim, tidak ada kolong meja (*softskill*) yang nyaman untuk menyelonjorkan kaki dengan nyaman saat bekerja tanpa ada meja (*hardskill*) itu sendiri yang dirancang secara ergonomis. Jadi, tidak ada yang mendapatkan kolong meja secara terpisah.

Pengembangan dan penyusunan kurikulum harus memperhitungkan peluang untuk penguasaan *softskill* bagi para pembelajar. Muatan kurikulum yang memberdayakan dan memfasilitasi terjadinya akuisisi *softskill* di antaranya adalah muatan yang mendukung pembentukan karakter bangsa yang positif, kewirausahaan, etos kerja cerdas dan tekun, belajar sepanjang hayat, dan juga kepedulian sosial serta kepedulian terhadap lingkungan berkelanjutan. Khusus kepedulian pada lingkungan diwujudkan dalam EfSD (*Education for Sustainable Development*) atau di dunia lebih dikenal sebagai ESD tanpa *for*. EfSD mulai dikembangkan di dunia pendidikan sejalan dengan program dari Perserikatan Bangsa - Bangsa pada Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*Commission on Sustainable Development*), CSD sejak tahun 1998.

BAB II

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

2.1 Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu (1) masukan (input); (2) proses; (3) keluaran (output); dan (4) capaian (outcome). Masukan perguruan tinggi adalah lulusan SMU dan SMK sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang telah ditawarkan. Masukan yang baik memiliki beberapa indikator, tidak hanya nilai kelulusan yang baik, tetapi terlebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai. Makin dikenal perguruan tinggi yang ada makin baik kualitas masukannya. Hal itu disebabkan karena, perguruan tinggi tersebut menjadi sasaran favorit lulusan SMU/SMK sederajat yang ingin meneruskan pendidikannya. Setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi mahasiswa, tahapan selanjutnya adalah menjalani proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) organisasi perguruan tinggi yang sehat; (2) pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel; (3) ketersediaan rancangan pembelajaran perguruan tinggi dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (4) kemampuan dan keterampilan SDM akademik dan nonakademik yang andal dan profesional; (5) ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai. Dengan memiliki kelima unsur pembelajaran tersebut, perguruan tinggi akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang profesional. Pada perkembangannya, ketercapaian iklim dan masyarakat akademik tersebut dijamin secara internal oleh perguruan tinggi masing-masing. Namun, proses penjaminan kualitas secara internal tersebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil perguruan tinggi saja. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mensyaratkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar

dapat menghasilkan lulusan yang baik.

Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, diharapkan akan dihasilkan lulusan perguruan tinggi yang berkualitas. Beberapa indikator yang sering dipasang untuk menengarai keberhasilan lulusan perguruan tinggi adalah (1) indeks prestasi kumulatif (IPK); (2) lama studi dan (3) predikat kelulusan yang disandang. Namun, proses itu tidak hanya berhenti di sini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, pendidikan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan perguruan tinggi untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat inilah yang juga akan membawa nama dan kepercayaan perguruan tinggi di mata calon pendaftar, yang akhirnya bermuara lagi pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar. Proses itu kemudian akan berputar menyerupai siklus. Oleh karena itu, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk mendatangkan calon mahasiswa baru, tahapan sistem pendidikan tinggi yang kita miliki harus diperbaiki dahulu, bukan hanya dengan promosi yang tidak dilandasi dengan kualitas sistem pendidikan yang baik. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat ilustrasi Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1 Alur Sistem Pendidikan Tinggi



2.2 Peran Kurikulum di dalam Sistem Pendidikan Tinggi

Kurikulum memiliki makna yang beragam baik antar negara maupun antar institusi penyelenggara pendidikan. Hal itu disebabkan karena adanya interpretasi yang berbeda terhadap kurikulum, yaitu dapat dipandang sebagai suatu rencana (*plan*) yang dibuat oleh seseorang atau sebagai suatu kejadian atau pengaruh aktual dari suatu rangkaian peristiwa (Johnson, 1974).

Sementara itu, menurut SK Mendiknas No. 232/U/2000 tersebut bahwa "Kurikulum **pendidikan tinggi** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi."

Jika dikaitkan dengan sistem pendidikan tinggi yang telah terjabarkan di atas, kurikulum dapat berupa (1) kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya; (2) filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik; (3) patron atau pola pembelajaran karena menurut SK Mendiknas 232/U/2000 kurikulum juga merupakan bahan kajian, cara penyampaian dan penilaian pembelajaran; (4) iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial perguruan tinggi dalam mencapai tujuan pembelajarannya; (5) rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; serta (6) ukuran keberhasilan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari penjelasan ini, tampak bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, tetapi merupakan suatu rangkaian proses yang sangat krusial dalam pendidikan.

Saat ini dapat kita bayangkan, bagaimana seandainya terjadi perubahan yang sedemikian pesat dalam masyarakat global? Apakah proses dan sistem pendidikan tinggi kita dapat juga berubah sesuai dengan tuntutan tersebut? Ataupun perguruan tinggi terus menjalankan bisnis lamanya sehingga kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja dan ketersediaan perguruan tinggi semakin besar? Dapatkah kita bayangkan bagaimana jadinya jika perguruan tinggi tetap menggunakan pola, kebijakan, filosofi, dan ukuran lama?

Sementara itu, pasar kerja sudah mulai menggunakan hal yang sangat berbeda, bahkan terus berubah dengan percepatan yang cukup tinggi? Untuk menghadapi masalah di atas dan dalam rangka mengembangkan pendidikan tinggi yang hasil didiknya dapat berkompetisi secara global, Pemerintah *c.q.* Ditjen Dikti, Depdiknas, mengembangkan kurikulum yang in line dengan visi dan aksi pendidikan tinggi pada abad XXI menurut UNESCO¹), yang kemudian dikonfirmasi dalam The World Conference All di Thailand Tahun 1990. Terdapat 17 butir (*articles*) yang dideklarasikan oleh UNESCO (1998), agar pendidikan tinggi dapat menjalankan fungsinya di abad XXI.

Visi dan misi pendidikan tinggi abad XXI dari UNESCO (1998) berintikan isi laporan *The International Commission on Education for the Twenty-first Century (Learning: the Treasure Within)* yang diketuai oleh Jacques Delors (UNESCO, 1998)²), dengan pokok isi antara lain, adalah sebagai berikut.

(1) **Harapan ke depan** peran pendidikan tinggi:

- a) Jangkauan dari komunitas lokal ke masyarakat dunia
- b) Perubahan kohesi sosial ke partisipasi demokratis, di antaranya berupa kenyataan: (i) pendidikan dan krisis kohesi sosial, (ii) pendidikan vs ekslusi, (iii) pendidikan dan desakan pekerjaan di masyarakat, serta (ii) partisipasi demokratis berupa pendidikan *civic* dan praktik berkewarganegaraan;
- c) Pertumbuhan ekonomi ke pengembangan kemanusiaan.

(2) **Asas pengembangan** pendidikan

- a) Empat pilar pendidikan: (i) belajar untuk (*learning to know*), (ii) belajar untuk berbuat (*learning to do*) { **perubahan dari keahlian ke kompetensi, dematerialisasi pekerjaan dan naiknya sector layanan (*the rise of service sector*), serta bekerja di bidang ekonomi informal** }, (iii) belajar untuk hidup bersama (*learning to live together*), belajar untuk hidup dengan orang lain (*learning to live with others*) menemukan orang lain dan bekerja untuk tujuan bersama (***discovering others and working toward common objectives***), dan (iv) belajar untuk menjadi (*learning to be*);
- b) Belajar sepanjang hayat (*learning throughout life*) sebagai wujud (i) imperatif

demokrasi (*imperative for democracy*), (ii) pendidikan multidimensional, (iii) munculnya waktu baru (*new time*) dan lapangan segar (*fresh field*), (iii) pendidikan pada hati masyarakat (*at the heart of society*), dan (iii) kebutuhan sinergi dalam pendidikan.

¹⁾ *Higher Education in the Twenty-first Century: Vision and Action*. World Conference on Higher Education. UNESCO, Paris, 5-9 October 1998.

- (3) **Arah pengembangan** pendidikan, khususnya pendidikan tinggi
- a) Kesatuan pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi: (i) pendidikan dasar sebagai "paspor" untuk berkehidupan, (ii) pendidikan menengah (*secondary education*) sebagai persimpangan jalan menentukan kehidupan, dan (iii) pendidikan tinggi dan pendidikan sepanjang hayat;
 - b) Perguruan tinggi menjadi tempat pembelajarandan suatu sumber daya pengetahuan
 - c) Peran pendidikan tinggi untuk menanggapi perubahan pasar kerja
 - d) Perguruan tinggi sebagai pusat kebudayaan dan pembelajaran terbuka untuk semua
 - e) Pendidikan untuk wahana kerja sama international

²⁾ Naskah lengkap dalam *Learning: the Treasure Within, 1996*. Report to UNESCO of the International Comission on Education for the Twenty-first Century. UNESCO Publishing/The Australian National Commission for UNESCO. 266 hal.

BAB III

ALASAN PERLUNYA PERUBAHAN

Pada beberapa dekade lalu proses penyusunan kurikulum dilakukan berdasarkan tradisi lima tahunan (jenjang S1) atau tiga tahunan (jenjang D3) yang selalu menandai berakhirnya tugas satu perangkat kurikulum. Selain itu, penyusunannya disebabkan oleh rencana strategis perguruan tinggi yang memuat visi dan misi perguruan tinggi yang juga telah berubah. Sebagian besar alasan perubahan kurikulum berasal dari permasalahan internal perguruan tinggi sendiri. Hal itu bukan suatu kesalahan, melainkan pemahaman secara lebih dalam berdasarkan sistem pendidikan yang telah dijelaskan di atas, sehingga terjadi perubahan pada tuntutan dunia kerja. Karena itu sewajarnya proses di dalam perguruan tinggi kita juga perlu beradaptasi. Alasan inilah yang seharusnya dikembangkan untuk melakukan perubahan kurikulum perguruan tinggi di Indonesia.

Untuk dapat lebih meyakinkan alasan perubahan ke arah kurikulum berbasis kompetensi dari kurikulum berbasis isi, dapat direfleksikan ilustrasi berikut ini. Manakala sebuah program studi pada tahun 2008 tengah mengembangkan kurikulumnya, prodi tersebut akan melakukan analisis SWOT dan *Labour Market Signals*. Pertanyaannya akan dibawa ke mana lulusannya nanti. Manakala prodi melakukan analisis berbasis isi (konten pengetahuan) yang akan diajarkan, ditetapkanlah konten/pengetahuan tersebut sebagai tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh lulusannya atau di dalam SK Mendikbud No. 56/U/1994 disebut berdasarkan tujuan untuk menguasai isi ilmu pengetahuan dan penerapannya (*content based*). Pada situasi global seperti saat ini, yang mempercepat perubahan terjadi di segala sektor, akan sulit bagi masyarakat untuk menahan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebelum tahun 1999 (era *pre-milenium*) perubahan ipteks yang terjadi mungkin tidak sedahsyat pasca-milenium. Manakala prodi mengembangkan tujuan pembelajaran sebagai titik akhir proses yang

dilakukan berdasarkan pada isi, tentu prodi tersebut akan demikian mudah tertinggal oleh pasar kerja.

Hal itulah yang makin meregangkan dan memperpanjang jarak antara penyedia SDM dan pasar kerja yang memerlukan SDM.

Jika program studi tersebut menetapkan hasil akhir lulusannya dalam hal kompetensi (kemampuan) untuk dapat mencari, menyusun, membuat, dan mengembangkan ipteks baru, lulusannya akan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di pasar kerja. Paradigma itulah yang mendasari munculnya SK Mendiknas 232/U/2000 agar dapat mewujudkan strategi sehingga satu mata kuliah dapat membangun satu atau lebih dari satu kompetensi. Sebaliknya, satu kompetensi dapat dibangun oleh satu atau lebih dari satu mata kuliah. Kurikulum Institusional dipilih komplementer dengan kurikulum inti dan **disesuaikan dengan kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain dari luaran (hasil didik) yang diharapkan. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama**, yang ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan (SK Mendiknas No. 045/U/2002).

Selain itu, dapat dilakukan pula analisis bahwa terjadi perbedaan indikator kesuksesan antara keluaran lulusan perguruan tinggi dengan capaian lulusan yang telah bekerja. Pada saat lulusan masih dianggap sebagai keluaran, indikator keberhasilan yang sering dipasang adalah (1) IPK; (2) lama studi, dan (3) predikat. Kesemua indikator tersebut ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi. Pada kenyataannya, ternyata hal tersebut tidaklah cukup untuk menjadi perguruan tinggi tersebut berkualitas. Sebuah perguruan tinggi dapat saja menetapkan IPK lulusannya 3,7. Namun, pada sisi lain, masyarakat belum tentu sepakat dengan angka tersebut. Pada saat lulusan telah bekerja (*outcome*), masyarakat memasang indikator yang berbeda, bukan lagi IPK, lama studi dan predikat, melainkan lebih ke arah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan, kemampuan dan prestasi kerja, serta efektivitas dan efisiensi kerjanya. Ketiga indikator ini tidak pernah dibayangkan oleh perguruan tinggi untuk dapat disasar. Oleh karena itu, dengan segenap kekuatannya, SK Mendiknas No. 232/U/2000 dan 045/U/2002 berusaha untuk mengubah tujuan dan

Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 26

sasaran pendidikan ke arah ketercapaian kompetensi lulusan, bukan sekadar penguasaan pengetahuan.

Jika kita cermati definisi kurikulum dalam SK Mendikbud No. 056/U/1994 yang lalu, termuat bahwa keluaran proses pembelajaran dari kurikulum nasional adalah kemampuan minimal dalam penyelesaian suatu program studi. Kemampuan minimal tersebut adalah penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu program studi (PS). Untuk mencapai keluaran proses pembelajaran yang sesuai dengan rancangan kurikulum, disusun kurikulum dengan elemen–elemen yang terdiri atas mata kuliah umum (MKU), mata kuliah dasar keahlian (MKDK), dan mata kuliah keahlian (MKK), baik untuk kurikulum nasional maupun untuk kurikulum lokal, yang disertai dengan imbalan beban muatan masing-masing.

Dalam hal ini mutu keluaran pendidikan tinggi menurut kurikulum berdasarkan SK Mendikbud No.056/U/1994 yang menilai adalah perguruan tinggi (program studi) bersangkutan, sebagai pelaksana /penyelenggara pendidikan tinggi. Oleh karena itu nilai hasil belajar peserta didik bersifat relatif, subyektif, beragam, serta lebih dipengaruhi oleh "ketenaran nama" perguruan tinggi di masyarakat. Dengan pendekatan pada sasaran minimal penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu program studi (PS), maka materi pembelajaran, beban muatan, dan urutan penyampaian di dalam kurikulum nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan status sebagai pedoman yang ditetapkan. Pada SK Mendikbud 056/U/1994 tersebut, proses penyampaian materi pembelajaran diserahkan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan. Proses pembelajaran tidak pernah dicantumkan dalam kurikulum SK Mendikbud No. 056/U/1996. Dengan mengacu pada konsep pendidikan tinggi abad XXI UNESCO (1998) tersebut, dilakukan pembaharuan terhadap kurikulum yang telah berjalan (Kurikulum SK Mendikbud No. 056/U/1996), yang dituangkan dalam SK Mendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002.

Perubahan mendasar yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Keluaran hasil pendidikan tinggi yang semula berupa kemampuan minimal

penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu program studi (PS) diganti dengan kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas yang penuh tanggung jawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Keluaran hasil pendidikan tinggi semula ditentukan oleh penilaian penyelenggara pendidikan tinggi, lalu diganti oleh penilaian yang dilakukan oleh masyarakat pemangku kepentingan.

2. Kurikulum yang semula disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi (program studi) yang bersangkutan diganti dengan kurikulum yang disusun oleh perguruan tinggi **bersama-sama** dengan pemangku kepentingan, dan **ditetapkan** oleh perguruan tinggi (program studi) yang bersangkutan.
3. Berdasarkan SK Mendikbud No. 056/U/1996 komponen kurikulum tersusun atas kurikulum nasional (kurnas) dan kurikulum lokal (kurlok) yang terdiri atas mata kuliah umum (MKU), mata kuliah dasar keahlian (MKDK), dan mata kuliah keahlian (MKK) yang disusun dengan tujuan untuk menguasai isi ilmu pengetahuan dan penerapannya (*content based*). Sementara itu, dalam SK Mendiknas No. 232/U/2000 disebutkan bahwa kurikulum terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional yang terdiri atas kelompok-kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK), mata kuliah keahlian berkarya (MKB), mata kuliah perilaku berkarya (MPB), serta mata kuliah berkehidupan bersama (MBB). Namun, pada SK Mendiknas No. 045/U/2002, pengelompokan mata kuliah tersebut diluruskan pemahamannya agar lebih luas dan positif melalui pengelompokan berdasarkan elemen kompetensinya, yaitu (a) landasan kepribadian, (b) penguasaan ilmu dan keterampilan, (c) kemampuan berkarya, (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmun dan keterampilan yang dikuasai, dan (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Dengan demikian, satu mata kuliah dapat membangun satu atau lebih dari satu kompetensi. Sebaliknya satu kompetensi dapat dibangun oleh satu atau lebih dari satu mata kuliah. Kurikulum institusional dipilih komplementer dengan

kurikulum inti yang disesuaikan dengan kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain dari keluaran (hasil didik) yang diharapkan. Kurikulum inti merupakan ciri dari kompetensi utama yang ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan (SK Mendiknas No. 045/U/2002).

4. Untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang menjadikan perguruan tinggi menjadi tempat pembelajaran dan suatu sumber daya pengetahuan, pusat kebudayaan, serta tempat pembelajaran terbuka untuk semua, maka dimasukkan strategi kebudayaan dalam pengembangan pendidikan tinggi. Strategi kebudayaan tersebut berwujud pada kemampuan untuk menangani masalah-masalah yang terkait dengan aspek berikut:

- (i) fenomena *anthrophos*, dicakup dalam pengembangan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- (ii) fenomena *tekne*, dicakup dalam penguasaan ilmu dan keterampilan untuk mencapai derajat keahlian berkarya;
- (iii) fenomena *oikos*, dicakup dalam kemampuan untuk memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya; dan
- (iv) fenomena *ethnos*, dicakup dalam pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keahlian yang dikuasai.

Perubahan kurikulum juga berarti perubahan proses pembelajaran. Artinya, proses pembelajarannya tidak hanya merupakan suatu proses alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga merupakan suatu proses pembekalan yang berupa metode inquiri/penggalan (*method of inquiry*) seseorang yang berkompeten dalam berkarya di masyarakat. Dengan demikian, secara jelas tampak bahwa perubahan kurikulum berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan (KBI) menurut SK Mendikbud No. 056/U/1994, menjadi KBK (SK Mendiknas No. 232/U/2000) mempunyai beberapa harapan

keunggulan, yaitu:

”keluaran hasil pendidikan (*outcomes*) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia usaha/industry, dan kebutuhan profesi. Dengan pengertian bahwa keluaran merupakan kemampuan mengintegrasikan keahlian intelektual, *knowledge* dan afektif dalam sebuah perilaku secara utuh.”

Beberapa perubahan konsep dalam kurikulum tersebut dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 1. Rangkuman Perubahan dari KBI ke KBK

PERUBAHAN KURIKULUM			
NO	TINJAUAN	BERBASIS ISI (KBI)	BERBASIS KOMPETENSI (KBK)
1	Latar belakang	Masalah internal	Masalah global
2	Basis kurikulum	Isi (<i>content based</i>)	Kompetensi (<i>competence based</i>)
3	Luaran PT	Kemampuan minimal sesuai sasaran kurikulum	Kompetensi yang dianggap mampu oleh masyarakat
4	Penilai kualitas lulusan	Perguruan tinggi sendiri	PT dan masyarakat serta pengguna lulusan
5	Pembelajaran	Lebih banyak “ <i>teacher centered</i> ”	“ <i>student centered</i> ”
6	Penekanan	Lebih banyak pada keluaran (<i>hardskills</i>)	<i>Outcomes</i> , keseimbangan <i>hardskills</i> dan <i>softskills</i> .

MEMAHAMI LEBIH DALAM SK MENDIKNAS NO.232/U/2000 DAN SK MENDIKNAS NO. 045/U/2002

SK MENDIKNAS No. 232/U/2000 memang menyimpan suatu keraguan dan tanda tanya yang cukup besar. Meskipun telah dilakukan berbagai macam model dan jumlah sosialisasi KBK, baik melalui rapat kerja nasional (rakernas), rapat kerja wilayah (rakerwil) maupun kesempatan akhir, hingga akhir batas waktu yang ditentukan untuk implementasi KBK di perguruan tinggi Indonesia, yaitu tanggal 20 Desember 2002, ternyata belum satu pun perguruan tinggi yang

terpilih sebagai sampel dalam kajian yang dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja Inventarisasi dan Evaluasi Implementasi KBK di perguruan tinggi tahun 2003 yang telah merekonstruksi dan mengimplementasikan KBK sesuai dengan harapan.

Masalah utama yang ditemukan di lapangan dengan belum dilaksanakannya SK Mendiknas No.232/U/2000 dan No. 045/U/2002 berkaitan dengan masih beragamnya tingkat pemahaman dan penilaian arti penting oleh pimpinan perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa terhadap makna dan bagaimana menyusun KBK dengan benar. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika implementasi KBK di perguruan tinggi juga masih belum dapat dilaksanakan. Berdasarkan studi yang telah dilaksanakan di tahun 2003, diperoleh data bahwa pemahaman terhadap KBK masih berbeda-beda dan kesiapan untuk melakukan perubahan kurikulum di perguruan tinggi juga berbeda.

Untuk memahami KBK, selayaknya perguruan tinggi harus memahami baik SK 232/U/2000 maupun SK.045/U/2002 dengan tidak dapat hanya mengambil salah satu dari SK tersebut. Kedua SK tersebut sebetulnya saling melengkapi, tetapi sebagian SK tersebut mengandung makna yang berbeda, yaitu bahwa dalam SK Mendiknas No. 232/U/2000 disebutkan bahwa kurikulum terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional yang terdiri atas kelompok-kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK), mata kuliah keahlian berkarya (MKB), mata kuliah perilaku berkarya (MPB), serta mata kuliah berkehidupan bersama (MBB). Namun, pada SK Mendiknas No. 045/U/2002, pengelompokan mata kuliah tersebut diluruskan pemahamannya agar lebih luas dan positif melalui pengelompokan berdasarkan elemen kompetensinya, yaitu (a) landasan kepribadian, (b) penguasaan ilmu dan keterampilan, (c) kemampuan berkarya, (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Dengan demikian, satu mata kuliah dapat membangun satu atau lebih dari satu kompetensi. Sebaliknya, satu kompetensi dapat dibangun oleh satu atau lebih dari satu mata kuliah.

secara mendalam di dalam SK Mendiknas No. 045/U/2002. Kurikulum inti menurut SK tersebut adalah kurikulum yang menjadi penciri dari program studi. Kurikulum inti terbangun atas kompetensi utama suatu lulusan. Kurikulum inti merupakan ciri dari kompetensi utama, yang ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Persentase kurikulum inti yang dibangun atas kompetensi utama lulusan adalah sebesar 40% – 80% dari keseluruhan kompetensi yang ada. Sementara itu, kurikulum institusional terbangun atas kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. Kompetensi pendukung adalah kompetensi lulusan yang masih berhubungan dengan program studi yang bersangkutan namun tidak wajib diberikan pada lulusannya. Kompetensi pendukung itu dapat bergerak antara 20% - 40% dari keseluruhan kompetensi yang ada. Sementara itu, kompetensi lainnya adalah jenis kompetensi lulusan yang berasal dari program studi lain, tetapi diambil untuk memperkaya lulusannya. Kompetensi lainnya bergerak antara 0% - 30% dari kompetensi secara keseluruhan. Baik kompetensi pendukung maupun kompetensi lainnya sebagai penyusun kurikulum institusional ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, melalui program studi masing-masing.

BAB IV

LANGKAH LANGKAH PENYUSUNAN KURIKULUM

Selama ini banyak perguruan tinggi yang cara menyusun kurikulumnya dimulai dengan melihat dan mengambil mata kuliah yang ada di beberapa perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang dianggap baik. Proses memetik mata kuliah itu sering dianggap sebagai proses penentuan tolok ukur. Mata kuliah yang dianggap sesuai dan selaras dengan tujuan dan visi pembelajaran di perguruan tinggi akan diunduh dan ditempelkan bersama dengan mata kuliah lain dan dimasukkan ke dalam sebuah struktur kurikulum. Menyusun mata kuliah dalam kurikulum (peta kurikulum) adalah menyusun suatu strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikannya. Karena merupakan suatu strategi, mata kuliah dibangun dengan pertimbangan fasilitas dan kemampuan yang ada di perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu, mengunduh dan menggunakan strategi yang dikembangkan oleh suatu perguruan tinggi tidak selalu tepat dengan keadaan di perguruan tinggi yang lain.

Di samping itu, cara yang lazim dilakukan dalam menyusun kurikulum di pendidikan tinggi adalah dengan melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*) dan studi lacak (*tracer study*). Dari hasil analisis aspek tersebut ditentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan inilah yang kemudian dijabarkan dalam mata kuliah yang disusun tiap semester berdasarkan urutan kemampuan atau logika keilmuannya. Langkah selanjutnya adalah menjabarkan setiap mata kuliah ke dalam bahan ajar. Fokus penyusunan kurikulum semacam itu adalah penguasaan sejumlah pengetahuan dan cara penerapan keilmuan (*knowhow/skills*). Oleh karena itu, susunan mata kuliah dalam kurikulum sangat erat hubungannya dengan logika keilmuan dari suatu program studi. Dengan penguasaan keilmuan diharapkan lulusan dapat menerapkannya di bidang kerja yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Kurikulum semacam itu sering dinamakan kurikulum berbasis isi (KBI). Tujuan pendidikan yang ditetapkan seperti uraian di atas lebih banyak mengarahkan lulusan pada kemampuan yang dirancang oleh perguruan tinggi sendiri, kurang atau belum diarahkan untuk menjawab tantangan kebutuhan pasar kerja dan kehidupan

bermasyarakat.

Pada tahun 1993 cara itu pernah digunakan untuk menetapkan sejumlah mata kuliah wajib berikut besarnya sks untuk kurikulum setiap jenis program studi, yang dinamakan kurikulum nasional.

Cara penyusunan kurikulum yang disajikan dalam buku ini adalah sebuah alternatif yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan yang lebih luas, yaitu adanya perubahan yang sangat cepat. Seperti yang telah diuraikan di depan, yakni berdasarkan kajian empat pilar pendidikan dari IBE-UNESCO dan perubahan pada tatanan global yang menuntut adanya kemampuan tenaga kerja terdidik yang dapat mengikuti perubahan tersebut, diperlukan perubahan kurikulum, khususnya perubahan kemampuan lulusan pendidikan tinggi. Selain itu, dengan diberlakukannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang sudah menjadi Perpres No 12 tahun 2012, lulusan pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi yang levelnya sesuai dengan strata dan jenis pendidikannya. Rincian keseluruhan langkah penyusunan kurikulum yang diusulkan dalam panduan ini dapat diikuti dalam skema berikut.



Secara rinci penyusunan kurikulum diatas diuraikan sebagai berikut :

4.1 Penetapan profil lulusan.

Yang dimaksud dengan profil disini adalah peran dan fungsi yang dapat dijalankan oleh lulusan setelah memasuki area kerja dan atau masyarakat. Profil ini dihasilkan dari *tracer study* terhadap alumni, analisis *need assessment* dari *stakeholders*, *scientific vision* dan analisis *SWOT* dari program studi maupun perguruan tinggi. Profil ini dapat dipandang sebagai *outcome* pendidikan yang akan dituju. Dengan menetapkan profil, perguruan tinggi dapat memberi jawaban terutama kepada calon mahasiswa tentang apa yang dapat diperankan setelah melakukan semua proses pembelajaran di program studi tersebut. Dengan demikian profil dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran atau akuntabilitas akademik, yaitu dengan melihat seberapa besar jumlah lulusan yang dapat berperan di masyarakat atau dunia kerja sesuai dengan “profil” yang telah ditetapkan saat menyusun kurikulum.

Untuk menetapkan profil lulusan, dapat dimulai dengan menjawab pertanyaan: **“Akan menjadi apa sajakah setelah lulus program studi ini?”** Berikut disajikan berupa contoh profil lulusan program studi yang tertera di dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Beberapa contoh Profil Lulusan

NO	PRODI	CONTOH PROFIL
1	Agroteknologi	Pelaku bisnis pertanian Pengusaha di bidang pertanian Peneliti . Pendidik
2	Seni	Pencipta seni ; Pengkaji seni ; Pengelola seni ; Pendidik seni.
3	Keperawatan	Care provider ; Konsultan kesehatan ; Community leader ; Pendidik
4	Arsitek	Arsitek /Perancang Kontraktor/Pembangun Peneliti/pengamat

5	Psikologi	Pengelola SDM ; Konsultan advertising ; Konsultan pendidikan ; Pengelola Training ; Pendidik PAUD
---	-----------	---

4.2 Penetapan kompetensi lulusan/capaian pembelajaran

Setelah menetapkan profil lulusan sebagai *outcome* program studi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan program studi sebagai output pembelajarannya. Untuk menetapkan kompetensi lulusan, dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan: **“Untuk menjadi profil lulusan harus mampu melakukan apa saja?”** Pertanyaan ini diulang untuk setiap profil, sehingga diperoleh daftar kompetensi lulusan yang lengkap.

Kompetensi lulusan ini minimal harus mengandung 4 unsur deskripsi KKNi, yakni

- (i) deskripsi umum, sebagai ciri lulusan pendidikan di Indonesia;
- (ii) rumusan kemampuan di bidang kerja;
- (iii) rumusan lingkup keilmuan yang harus dikuasai; dan
- (iv) rumusan hak dan kewenangan manajerialnya.

Dengan demikian berarti **kompetensi lulusan/capaian pembelajaran setiap prodi harus mengacu pada rumusan “kemampuan” (yang disebut “deskripsi”) pada KKNi yang sesuai dengan jenjang/levelnya.** Sebagai contoh, dalam KKNi, lulusan S1 harus memiliki kualifikasi level 6, lulusan S2 harus berkualifikasi level 8, dan lulusan S3 kualifikasinya level 9. Selain itu rumusan capaian pembelajaran ini harus dinyatakan dengan jelas agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pemangku kepentingan (stakeholders) tentang kemampuan apa yang dimiliki oleh lulusan suatu program studi. Agar lebih jelas, gambar skematik berikut menyatakan deskripsi pada KKNi tersebut.



Deskripsi level 6 setara lulusan S1 :

- **Kemampuan di bidang kerja** : Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- **Penguasaan pengetahuan** : Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

Contoh deskripsi diatas perlu dijabarkan kedalam rumusan capaian pembelajaran/ kompetensi lulusan dari sebuah program studi tertentu, dan rumusan tersebut seharusnya dihasilkan oleh suatu forum komunikasi/ badan kerjasama/asosiasi program studi sejenis, serta akan menjadi kesepakatan sebagai penyetara kualifikasi lulusan program studi. Rumusan ini adalah kemampuan minimal lulusan suatu prodi, dan pengembangan maupun penjabaran lebih rinci “kemampuan” lulusan ini bisa saja dilakukan oleh prodi masing-

masing. Hal ini dijamin menurut ketentuan yang berlaku, antara lain ketentuan pasal 19 ayat 1 dan ayat 4 dari PP 19 tahun 2005 berikut ini :

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.

(4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

Rumusan deskripsi KKNi unsur deskripsi umum (1), kemampuan kerja (2), dan unsur (3) yakni hak dan tanggung jawab manajerial, dapat disetarakan dengan istilah “kompetensi utama” yang tercantum dalam Kepmendiknas no 232/U/2000 dan Kepmendiknas No. 45/U/2002, tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi, yang diartikan sebagai kompetensi yang merupakan penciri program studi. Sementaraitu, unsur ke (3) dari deskripsi KKNi, yang berisi rumusan pengetahuan/keilmuan yang harus dikuasai, dapat disetarakan dengan istilah “bahan kajian” dalam konsep pendidikan tinggi. Berdasarkan kedua aturan tersebut kompetensi lulusan terdiri dari tiga jenis yaitu kompetensi utama yang merupakan penciri program studi, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain, yaitu kompetensi yang ditambahkan oleh program studi masing-masing sebagai ciri lulusannya. Tabel berikut dapat menjelaskan hal itu.

Tabel 3 Matrik antara Profil dan Kompetensi Lulusan

Klasifikasi kompetensi menurut Kepmendiknas no 045/U/2002

PROFIL LULUSAN		KLASIFIKASI KOMPETENSI		
		PENCIRI PROGRAM STUDI	PENCIRI LEMBAGA/ INSTITUSI	
		KOMPETENSI UTAMA	KOMPETENSI PENDUKUNG	KOMPETENSI LAINNYA
1				
2				
3				
		↑ TRACER STUDY (kebutuhan stakeholders) & SCIENTIFIC VISION	↑ KESEPAKATAN PROGRAM STUDI SEJENIS	↑ VISI MISI PT - PS SENDIRI (university values)

Tim DIKTI 2011

4.3 Pengkajian Kandungan Elemen Kompetensi :

Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap rumusan kompetensi lulusan yang telah terumuskan, dengan lima elemen kompetensi yang terdapat pada SK Mendiknas 045/U/2002, yaitu (a) landasan kepribadian; (b) penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga; (c) kemampuan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya; serta (e) kaidah pemahaman berkehidupan bermasyarakat.

Setiap kompetensi yang dirumuskan dianalisis untuk melihat adanya kandungan elemen kompetensi tersebut di atas. Ada kemungkinan sebuah kompetensi mengandung lebih dari satu elemen kompetensi. Analisis adanya kandungan elemen kompetensi dilakukan dengan cara mengecek kemungkinan strategi pembelajaran untuk dapat mencapai kompetensi tersebut. Jika suatu kompetensi dapat dicapai dengan diselipkan ke dalam bentuk kurikulum terselubung, tidak diajarkan dalam sebagai topik bahasan, maka kompetensi tersebut dapat dinyatakan bermuatan elemen (a) landasan kepribadian yang lebih bersifat *softskills*.

Apabila akan diajarkan dalam bentuk topik bahasan dalam mata kuliah, kompetensi tersebut

dapat diartikan mengandung elemen (b) penguasaan ilmu dan keterampilan. Apabila kompetensi tersebut harus ditempuh dengan praktik kerja tertentu, kompetensi tersebut mengandung elemen (c) kemampuan berkarya. Apabila pembelajarannya dalam bentuk kerja praktik profesi yang memberikan kemampuan berperilaku sesuai dengan etik profesi, kompetensi tersebut mengandung elemen (d) sikap dan perilaku dalam berkarya. Apabila untuk mencapai kompetensi tersebut pembelajarannya dilakukan dengan mahasiswa yang terlibat langsung dengan masyarakat, kompetensi tersebut mengandung elemen (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat. Untuk lebih mudah dalam menganalisis elemen kompetensi, dapat digunakan matriks yang ada pada Tabel 3.4.

Tabel. 3.4 Matriks antara Rumusan Kompetensi dan Elemen Kompetensi dalam SK Mendiknas No. 045/U/2002

Kompetensi lulusan harus mengandung 5 elemen kompetensi

RUMUSAN KOMPETENSI		ELEMEN KOMPETENSI				
		A	B	C	D	E
1	Kompetensi Utama	V	V	V	V	V
2			V	V	V	
3		V	V		V	V
4			V	V		V
5		V		V	V	
6	Kompetensi Pendukung		V	V	V	
7		V	V			V
8		V	V	V		V
9	Kompetensi lainnya	V	V		V	
10			V	V	V	

(A) Landasan kepribadian. (B) Penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni dan OR
 (C) Kemampuan berkarya (D) Sikap dan perilaku dalam berkarya
 (E) Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat

Tim DIKTI 2011

4.4 Penentuan Bahan Kajian atau Materi Ajar

Setelah menganalisis elemen kompetensi, langkah selanjutnya adalah menentukan bahan kajian yang akan harus dikuasai untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi, ataupun seni yang menunjukkan ciri dari rumpun atau cabang ilmu tertentu, atau bidang kajian yang

merupakan inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan yang dibutuhkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan pada masa yang akan datang. Pilihan bahan kajian itu sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan program studi yang bersangkutan, yang biasanya dapat diambil dari program pengembangan program studi (misalnya, diambil dari pohon penelitian program studi). Tingkat keluasan, kedalaman, dan kerincian bahan kajian merupakan hak otonom masyarakat akademik di program studi tersebut. Bahan kajian bukan merupakan mata kuliah. Contoh bahan kajian yang sering ditemukan misalnya bidang agroteknologi antara lain, (1) ilmu tanaman; (2) media tanam; (3) teknologi tanaman; (4) lingkungan.

Contoh lain adalah program studi psikologi, yaitu, antara lain, (1) psikologi dasar (umum dan eksperimen); (2) psikologi perkembangan; (3) kajian psikodiagnostik dan psikometri; (4) kajian sosial.

4.5 Perkiraan dan Penetapan Beban (sks) serta Pembentukan Mata Kuliah

Penetapan kedalaman, kerincian, keluasan bahan kajian, dan tingkat penguasaannya, minimal harus mencakup “pengetahuan atau keilmuan yang harus dikuasai” dari deskripsi capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan level KKNI dan telah disepakati oleh forum program studi sejenis. Dengan menganalisis hubungan antara rumusan kompetensi lulusan dan bahan kajian, dapat dibentuk mata kuliah beserta perkiraan besarnya beban atau alokasi waktu (sks). Matriks rumusan kompetensi dan bahan kajian (Tabel 5) dapat digunakan sebagai alat bantu agar keterkaitan antara kompetensi dengan bahan kajian menjadi lebih jelas. Artinya tidak ada bahan kajian yang tidak terkait dengan kompetensi yang akan dicapai. Di sisi lain, dengan menggunakan matriks ini dapat diketahui asal munculnya mata kuliah dengan besarnya sks.

Tabel 5 Matriks Kaitan Bahan Kajian dan Kompetensi Lulusan

**KAITAN RUMUSAN KOMPETENSI DENGAN BAHAN KAJIAN
(YANG MENJADI KERANGKA KURIKULUM)**

RUMUSAN KOMPETENSI		BAHAN KAJIAN													
		Inti keilmuan program studi				IPEKS pendukung			IPEKS pelngkp		Yang dikemb		Untuk ms dpn		Ciri PT
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Kompetensi Utama														
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8	Kompetensi Pendukung														
9															
10															
11	Kompetensi lainnya														
12															

Pembentukan sebuah mata kuliah dapat ditempuh dengan menganalisis keterdekatan bahan kajian serta kemungkinan efektivitas pencapaian kompetensi apabila beberapa bahan kajian dipelajari dalam satu mata kuliah dengan strategi atau pendekatan pembelajaran yang tepat, seperti pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 3.6 Contoh Penetapan Mata Kuliah berdasarkan Matriks Hubungan antara Kompetensi Lulusan dan Bahan Kajian

RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES)	BAHAN KAJIAN							
	Ilmu Gizi	Ilmu pangan	Biomedik	Ilmu sosial	Humaniora	manajemen	kommunikasi	
Mampu merancang dan melaksanakan pelayanan gizi								
Mampu mengembangkan pelayanan gizi.....								
Mampu beradaptasi dalam menghadapi masalah gizi ..								
Mampu memformulasi kebijakan gizi untuk klien								
Mampu berkomunikasi secara efektif baik dalam								
Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan								
Memiliki kemampuan belajar yang terstruktur								
Memiliki kemampuan berfikir (meta kognitif)								
Mampu melakukan penelitian bidang gizi								
Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu gizi								
Menguasai konsep manajemen gizi untuk dapat								
Mampu bekerja sama dalam tim								

Note: The table contains colored cells indicating relationships. 'mk A' is highlighted in orange in the second column. 'mk B' is highlighted in yellow in the fifth column. 'mk C' is highlighted in red in the eighth column.

Pada tabel 3.6 di atas tampak banyak alternatif dalam membentuk mata kuliah. Mata kuliah A dan mata kuliah C merupakan integrasi dari berbagai ilmu yang bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan yang komprehensif karena dipelajari dalam satu bungkus mata kuliah. Akan tetapi, ada kemungkinan dibentuk mata kuliah B yang membahas satu bahan kajian untuk mencapai berbagai kompetensi. Tabel 7 berikut dapat menggambarkan lebih jelas alternatif pembentukan mata kuliah tersebut.

Tabel 7. Contoh Alternatif Penetapan Mata Kuliah

**MATRIKS HUBUNGAN BAHAN KAJIAN DAN KOMPETENSI
DALAM BENTUK MATAKULIAH**

KOMPETENSI	BAHAN KAJIAN				
	1	2	3	...	N
A			MK1		MK2
B		MK3			
C					
D				MK4	
E	MK6				
F					
G			MK5		
H					
I					
J					
K				MK7	
L					
M					

MK1 & MK2
beda jenis bahan kajian dalam satu kompetensi

MK3
tiga bahan kajian berkaitan dengan satu kompetensi

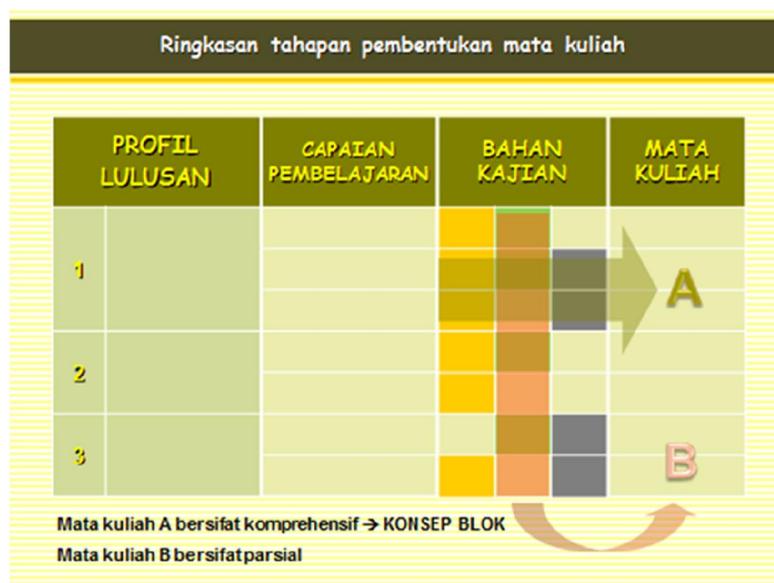
MK5 & MK6
satu bahan kajian untuk mencapai banyak kompetensi

MATA KULIAH ADALAH BUNGKUS DARI BAHAN KAJIAN

Dari contoh pembentukan mata kuliah seperti di atas, merangkai beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat dilakukan melalui beberapa pertimbangan, yaitu (a) adanya keterkaitan yang erat antar bahan kajian yang apabila dipelajari secara terintegrasi, diperkirakan akan lebih baik hasilnya; (b) adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu; (c) adanya metode pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa apabila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian, pembentukan mata kuliah mempunyai fleksibilitas yang tinggi sehingga satu program studi sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata kuliah yang sangat berbeda. Dalam hal ini, mata kuliah

hanyalah bungkus serangkaian bahan kajian yang dipilih sendiri oleh sebuah program studi. Jadi, secara ringkas menentukan mata kuliah dapat diurutkan sebagai berikut: penetapan profil lulusan, penjabaran capaian pembelajarannya, pemilihan bahan kajian yang perlu dikuasai, pembentukan mata kuliah yang dapat dilakukan dengan dua alternatif, yakni mata kuliah yang bersifat komprehensif yang mengintegrasikan beberapa bahan kajian, atau mata kuliah yang parsial yang berisi satu bahan kajian seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Urutan Pembentukan Mata Kuliah



Untuk menetapkan besaran sks sebuah mata kuliah, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti. Menurut Betts & Smith (2005) dalam buku *Developing the Credit-Based Modular Curriculum in Higher Education*, salah satu dasar pertimbangan penyusunan kurikulum dengan sistem kredit adalah beban kerja yang diperlukan mahasiswa dalam proses pembelajarannya untuk mencapai kompetensi hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.

Filosofi penetapan satuan kredit itu adalah kredit sama untuk filosofi kerja yang sama (*equal credit for equal work philosophy*). Oleh sebab itu, diperlukan perhitungan terhadap beban mata kuliah yang akan dipelajari. Beban mata kuliah itu sangat ditentukan oleh keluasan, kedalaman, dan kerincian bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi, serta tingkat penguasaan yang ditetapkan. Setelah mendapatkan beban/alokasi waktu untuk sebuah mata kuliah, dapat dihitung satuan kredit per

Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 44

semesternya dengan cara memperbandingkan secara proporsional beban mata kuliah terhadap beban total untuk mencapai sks total yang program pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah (misalnya program S-1 dan D-IV minimal beban sebesar 144 sks). Dalam paradigma pengembangan kurikulum ini, besarnya sks sebuah mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan dilakukan dengan menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu (a) tingkat kemampuan yang ingin dicapai, (b) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari, (c) cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan, (d) posisi/letak semester suatu mata kuliah atau suatu kegiatan pembelajaran dilakukan, dan (e) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester yang menunjukkan peran/ besarnya sumbangan suatu mata kuliah dalam mencapai kompetensi lulusan.

Secara prinsip pengertian sks harus dipahami sebagai **waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu**. Sementara itu, makna sks telah dirumuskan dalam SK Mendiknas 232/U/2000, yang menyebutkan bahwa **1 sks** :

- untuk perkuliahan di kelas bermakna 1 jam pembelajaran tatap muka di kelas, 1 jam tugas mandiri, dan 1 jam tugas terstruktur setiap minggunya;
- untuk pembelajaran dalam bentuk responsi atau tutorial bermakna 2 jam tugas di ruang tutorial atau praktik dan 1 jam tugas mandiri setiap minggunya; dan
- untuk metode praktik, workshop dan bengkel bermakna 3 jam melaksanakan tugas di tempat praktik.

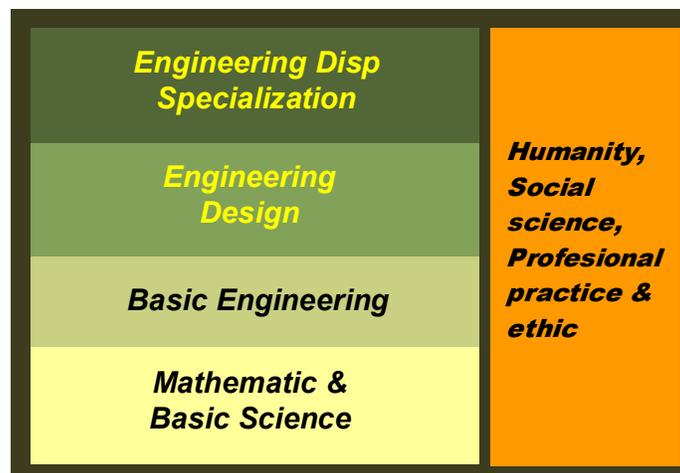
Dengan panduan pengertian di atas, bentuk pembelajaran yang akan dirancang harus memperhitungkan makna sks di setiap mata kuliah yang ada.

4.6 Penyusunan Struktur Kurikulum

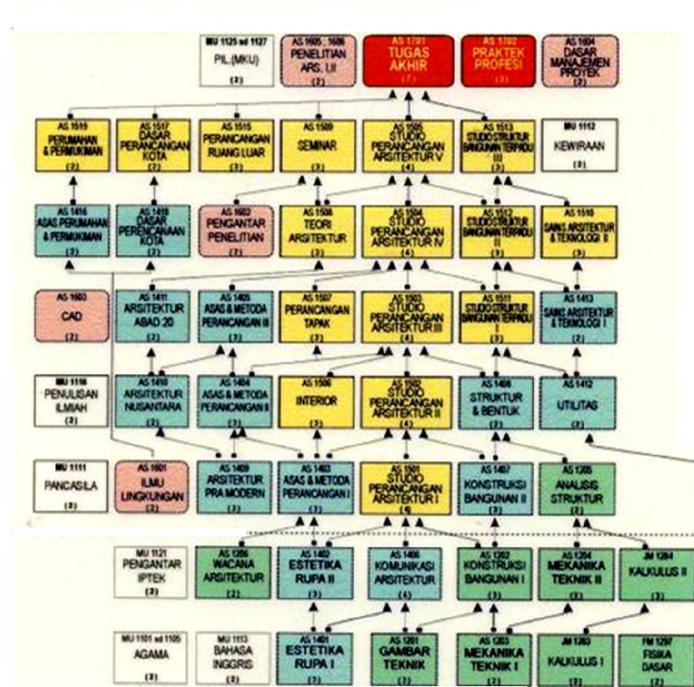
Pengaturan mata kuliah dalam tahapan semester sering dikenal sebagai struktur kurikulum. Secara teoretis terdapat dua macam pendekatan struktur kurikulum, yaitu model serial dan model paralel. Pendekatan model serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Pada pendekatan serial itu, mata kuliah

disusun dari yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuannya) sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap mata kuliah saling berhubungan yang ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat (*pre-requisite*). Mata kuliah yang tersaji pada semester awal akan menjadi syarat bagi mata kuliah di atasnya. Permasalahan yang sering muncul adalah siapa yang harus membuat hubungan antarmata kuliah antarsemester? Apakah itu mahasiswa atau dosen? Jika mahasiswa yang melakukannya, mereka belum memiliki kompetensi untuk memahami keseluruhan kerangka keilmuan tersebut. Jika dosen yang melakukannya, tidak ada yang menjamin terjadinya kaitan tersebut mengingat antara mata kuliah satu dan yang lain diampu oleh dosen yang berbeda dan sulit dijamin adanya komunikasi yang baik antardosen yang terlibat. Kelemahan itulah yang menyebabkan lulusan dengan model struktur serial itu kurang memiliki kompetensi yang terintegrasi. Selain itu, adanya mata kuliah prasyarat sering menjadi penyebab melambatnya kelulusan mahasiswa karena apabila salah satu mata kuliah prasyarat tersebut gagal, dia harus mengulang pada tahun berikutnya. Gambar 3 di bawah ini menyajikan contoh kurikulum serial.

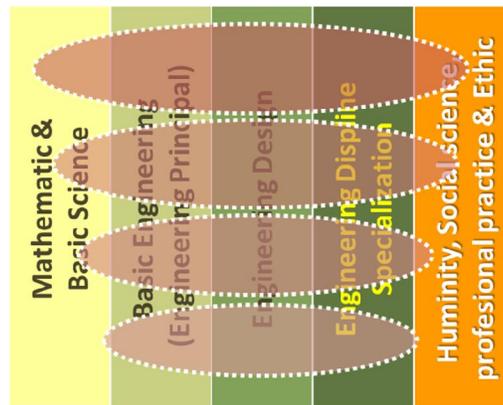
Gambar 3 : Contoh Skematik Struktur Kurikulum Serial



Gambar 4. Contoh Struktur Kurikulum Serial



Adapun pendekatan struktur kurikulum model paralel menyajikan mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Struktur paralel itu secara ekstrem sering ditemukan dalam model blok di program studi kedokteran. Model Blok adalah struktur kurikulum paralel yang tidak berdasarkan pembelajaran semesteran, tetapi berdasarkan ketercapaian kompetensi di setiap blok sehingga sering pula disebut sebagai model modular, karena terdiri dari beberapa modul/blok. Akan tetapi, struktur kurikulum paralel tidak hanya dilaksanakan dengan model blok, tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk semesteran yaitu dengan mengelompokkan beberapa mata kuliah berdasarkan kompetensi yang sejenis. Dengan demikian, setiap semester akan mengarah pada pencapaian kompetensi yang serupa dan tuntas pada semester tersebut, tanpa harus menjadi syarat bagi mata kuliah di semester berikutnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh pada Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4 Contoh Skematik Struktur Kurikulum Paralel

SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4	SEMESTER 5	SEMESTER 6	SEMESTER 7 – 9
Kemampuan Bahasa, IT, Al-Islam, Kepribadian & Wawasan Kebangsaan	Penguasaan kemampuan dasar iptek budidaya tanaman (1)	Penguasaan kemampuan dasar iptek budidaya tanaman (2)	Penguasaan kemampuan pengelolaan hasil tanaman & penerapan bioteknologi	Penguasaan kemampuan mengelola sumberdaya alam & agribisnis	Penguasaan kemampuan penyelesaian masalah pertanian dalam lingkup global	Penguatan dan Integrasi Kompetensi
22 sks	24 sks	24 sks	22 sks	23 sks	23 sks	6 sks
Bahasa Inggris (8)	Fisiologi Tanaman (4)	Manajemen SDA (3)	Fisiologi Pasca-panen (3)	Tata Guna & Evaluasi Lahan (4)	Kapita Selekta Produksi Tanaman (5)	Skripsi (6)
ICT (4)	Ilmu Tanah (3)	Agroekologi (4)	Teknologi Pascapanen (6)	Analisis dan Perencanaan Lanskap (4)	Kapita Selekta Budidaya Tanaman (9)	
Kewarganegaran (2)	Teknologi Bahan Tanam (3)	Problematika HATT (6)	Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman (3)	Desain Lanskap (3)	Informatika Pertanian dalam Tataan Global (3)	
Al Islam & Kemuhimmadiyah (4)	Teknologi Budidaya Tanaman (6)	Problematika Budi daya Tanaman (7)	Teknik Isolasi & Perbanyakan Agensia Hayati (4)	Manajemen Agribisnis Tanaman Industri (3)	Project Manajemen Agribisnis (6)	
Penulisan Ilmiah (2)	Kewirausahaan (2)	Problematika Agroekosistem (4)	Teknik Produksi & Formulasi Biofarming (4)	Manajemen Agribisnis Tanaman Pangan (3)		
Metode Ilmiah (2)	Budi daya Tanaman dalam Perspektif Al-Qur'an (2)		Metode Penelitian (2)	Manajemen Agribisnis Tanaman Hortikultura (3)		
	Ekologi dalam Perspektif Al-Qur'an (2)			Teknologi Biokonversi (2)		
	Iklim dalam Perspektif Al-Qur'an (2)					

Mengombinasikan sistem seri dan sistem paralel juga memungkinkan untuk dilakukan, yaitu kelompok bidang ilmu (dengan perincian bahan kajiannya) disusun secara paralel, kemudian rumusan kompetensi dan urutan strategi pembelajarannya disusun secara bertahap menurut semesternya. Dalam bentuk itu sebuah ilmu (bahan kajian) dipelajari pada saat yang diperlukan sesuai dengan tingkat kemampuan yang diharapkan mengarah kepada pencapaian kompetensi lulusan.

Alternatif penyusunan kurikulum ini tidak meninggalkan konsep penggunaan logika keilmuan program studi sebagai dasar penyusunan kurikulumnya. Akan tetapi, penyusunan kurikulum lebih menekankan pada pemikiran bahwa keilmuan bukan dijadikan sebagai suatu tujuan pendidikan, melainkan sebagai sarana dan media untuk mencapai kompetensi lulusan. Misalnya, matematika di bidang teknik tidak selalu diletakkan pada semester 1 dan semester 2 dengan alasan secara logis sebagai dasar keteknikan, tetapi memungkinkan bahan kajian matematika tersebut disebar ke beberapa semester sesuai dengan keperluannya. Dalam hal ini, belajar suatu materi dalam konteks tertentu, misalnya belajar matematika dalam konteks teknik elektro dan belajar etika dalam konteks klinis di ilmu kedokteran. Hal itu dapat dilakukan berdasarkan alasan adanya efektivitas dan efisiensi pencapaian suatu kompetensi apabila suatu bahan ajar dipelajari pada saat yang tepat dan dalam konteks yang tepat pula. Contoh penyusunan struktur kurikulum yang mengombinasikan sistem paralel dan seri dapat diikuti dalam Gambar 4 berikut.

Gambar 5 Contoh Skematik Struktur Kurikulum Kombinasi Serial-Paralel



Dengan demikian, struktur kurikulum dapat disusun dengan lebih bervariasi. Akan tetapi yang terpenting bukan kebenaran strukturnya, tetapi kurikulum harus dilihat sebagai program untuk mencapai kompetensi lulusan yang harus dilaksanakan. Kurikulum bukan hanya sekadar dokumen, melainkan kurikulum sebagaimana diungkapkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 adalah “seperangkat **rencana dan pengaturan** mengenai **isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian** yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.”

Oleh karena itu, perubahan suatu kurikulum perlu diikuti dengan perubahan perilaku dan pola pikir dari peserta serta pelaku pembelajaran, agar capaian pembelajaran yang ditetapkan dapat benar-benar terwujud.

BAB V

IMPLEMENTASI DALAM PEMBELAJARAN

5.1 Pengantar ke Arah Perubahan Pembelajaran

Kehidupan di abad XXI menghendaki dilakukannya perubahan pendidikan tinggi yang bersifat mendasar. Bentuk perubahan tersebut adalah (i) perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global), (ii) perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis, terutama dalam pendidikan dan praktik berkewarganegaraan, dan (iii) perubahan dari pertumbuhan ekonomik ke perkembangan kemanusiaan. UNESCO (1998) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan empat perubahan besar di pendidikan tinggi tersebut, dipakai dua basis landasan, berupa empat pilar pendidikan: (i) *learning to know*, (ii) *learning to do* yang bermakna pada penguasaan kompetensi dari pada penguasaan keterampilan menurut klasifikasi ISCE (*International Standard Classification of Education*) dan ISCO (*International Standard Classification of Occupation*), dematerialisasi pekerjaan dan kemampuan berperan untuk menanggapi bangkitnya sektor layanan jasa, dan bekerja di kegiatan ekonomi informal, (iii) *learning to live together with others* (belajar untuk hidup bersama dengan orang lain), dan (iv) *learning to be* (belajar untuk menjadi) serta belajar sepanjang hayat (*learning throughout life*).

Empat pilar pendidikan tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan utuh. Pengelompokan pilar hanya mencirikan pengutamaan substansi materi dan proses pembelajaran. Hal itu berarti bahwa kompetensi sebagai ciri utama dari penguasaan *learning to do* (belajar untuk berbuat) dari suatu materi pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan elemen kompetensi yang terkandung dalam *learning to know* (belajar untuk mengetahui), *learning to live together* (belajar untuk hidup bersama), dan *learning to be* (belajar untuk menjadi) dari materi yang bersangkutan atau materi-materi pembelajaran lainnya. Oleh karena itu, **pemisahan antara materi pembelajaran atas *hard skill* dan *soft skill* dalam satu kurikulum tidak berlaku lagi.** Makna *hard skill* dan *soft skill*

diakomodasi dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan dimensi proses kognitif, yaitu (i) mengingat/menghafalkan, (ii) memahami, (iii) menerapkan, (iv) menganalisis, (v) mengevaluasi, dan (vi) mengkreasi; dari setiap dimensi pengetahuan yang berjenjang, mulai dari dimensi faktual, dimensi konseptual, dimensi prosedural, dan dimensi pengetahuan metakognitif.

Perubahan mendasar pendidikan tinggi yang berlangsung di abad XXI, akan meletakkan kedudukan pendidikan tinggi sebagai (i) lembaga pembelajaran dan sumber pengetahuan, (ii) pelaku, sarana, dan wahana interaksi antara pendidikan tinggi dan perubahan pasaran kerja, (iii) lembaga pendidikan tinggi sebagai tempat pengembangan budaya dan pembelajaran terbuka untuk masyarakat, dan (iv) pelaku, sarana, dan wahana kerja sama internasional. Perubahan mendasar pendidikan tinggi yang mendunia tersebut ternyata sejalan dengan kebijakan strategi pengembangan pendidikan tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam bentuk (i) Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT-JP) III, 1995-2005, yang dilanjutkan dengan (ii) Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (SPT-JP atau *HELTS*), 2003-2010.

5.2 Kondisi Pembelajaran di Perguruan Tinggi Saat Ini

Kondisi pembelajaran di program studi/ perguruan tinggi masih cukup beragam. Perguruan tinggi yang telah menjalankan sistem penjaminan mutu dengan baik dari jenjang institusi sampai program studi umumnya telah melaksanakan pembelajaran yang berbasis capaian. Namun dari pengalaman Tim Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Pendidikan Tinggi melaksanakan pelatihan pengembangan kurikulum di seluruh Kopertis di Indonesia dengan permasalahan utama, yaitu

- a. kurangnya persiapan dosen di dalam menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran;
- b. ketidakjelasan rumusan capaian pembelajaran;
- c. ketidakjelasan strategi dan metode pembelajaran;
- d. ketidakjelasan apakah pilihan strategi dan metode pembelajaran merupakan pilihan yang tepat untuk memunculkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;

- e. aktivitas asesmen cenderung pada pemberian skor/nilai kepada mahasiswa daripada memberikan tuntunan untuk membuka potensinya; dan
- f. instrumen untuk melakukan asesmen cenderung mencirikan asesmen sumatif dari pada asesmen formatif.

Hal di atas dapat mengindikasikan bahwa pemahaman dosen dalam melaksanakan pembelajaran yang baik masih lemah atau dosen kurang peduli terhadap capaian pembelajaran, strategi, dan metode pembelajaran serta cara asesmen yang tepat. Ada anggapan bahwa dengan tatap muka sekali dalam satu minggu telah dilakukan pembelajaran sesuai dengan tuntutan aturan yang ada dengan ukuran pembelajaran yang baik adalah jumlah tatap muka di kelas. Di samping itu, sistem jaminan mutu pendidikan sering tidak berfungsi dengan baik, seperti sistem pendukung terkait dengan tata kelola sumber daya manusia, sarana prasarana dan lingkungan pembelajaran, sistem pelayanan, pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut dari hasil evaluasi.

Sering yang menjadi alasan tidak berkembangnya sistem pembelajaran dengan baik adalah kurangnya pendanaan. Walaupun pendanaan merupakan bagian dari perencanaan yang krusial dalam mendirikan atau mengembangkan program studi, nilai-nilai dalam pembelajaran semestinya tetap menjadi prioritas. Di sisi lain, tidak sedikit perguruan tinggi yang telah menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan baik, mampu mengembangkan nilai-nilai internalnya untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang dinamis. Perguruan tinggi seperti itu dengan mudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat lokal sekitarnya, nasional, dan bahkan internasional.

Sistem pembelajaran merupakan bagian penting untuk mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Sistem pembelajaran yang baik mampu memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuka potensi dirinya dalam menginternalisasikan pengetahuan, keahlian, dan perilaku serta pengalaman belajar sebelumnya. Sistem pembelajaran seperti itu mampu mengembangkan elemen-elemen kompetensi yang diamanatkan oleh Kepmendiknas No. 045/2002.

Dengan dikeluarkannya Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), program studi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang

sesuai dengan kualifikasi KKNI. Dengan demikian bagi Perguruan Tinggi yang masih bermasalah di dalam sistem pembelajarannya mesti segera melakukan pembenahan atau perbaikan untuk mampu menghasilkan lulusan paling tidak memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Demikian pula sistem penjaminan mutu pendidikannya mesti mampu mengendalikan proses pendidikan dengan baik merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI.

Selain itu, materi pembelajaran umumnya disusun tidak mengikuti taksonomi dimensi pengetahuan yang akan dicapai dan dimensi proses kognitif urutan serta cara penyampaian. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang banyak dipraktikkan sekarang ini sebagian besar berbentuk penyampaian secara tatap muka (*lecturing*) atau penyampaian secara searah (dari dosen kepada mahasiswa). Pada saat mengikuti kuliah atau mendengarkan ceramah, mahasiswa akan kesulitan untuk mengikuti atau menangkap makna esensi materi pembelajaran sehingga kegiatannya sebatas membuat catatan yang kebenarannya diragukan. Di samping itu, ada kecenderungan lain yaitu mahasiswa saat ini kurang mampu menyimak. Hal itu terjadi sebagai akibat dari ketergantungan pada bahan tayang dan fotokopi bahan tayang dari dosen. Mahasiswa kurang terbiasa dengan mencatat dengan menggunakan model *mind mapping* atau model *taking notes* lainnya. Mereka merasa tenteram karena bahan tayang dalam bentuk *power point* dapat diperoleh dari dosennya. Kebiasaan semacam itu perlu diubah karena mahasiswa menjadi pasif. Pola proses pembelajaran dosen aktif dengan mahasiswa pasif ini efektivitasnya rendah dan tidak dapat menumbuhkembangkan proses partisipasi aktif dalam pembelajaran. Keadaan itu terjadi sebagai akibat elemen-elemen terbentuknya proses partisipasi yang berupa, (i) dorongan untuk memperoleh harapan (*effort*), (ii) kemampuan mengikuti proses pembelajaran, dan (iii) peluang untuk mengungkapkan materi pembelajaran yang diperolehnya di dunia nyata/masyarakat tidak ada atau sangat terbatas. Intensitas pembelajaran mahasiswa umumnya meningkat, tetapi tetap tidak efektif, terjadi pada saat-saat akhir mendekati ujian. Itu pun terlihat dari rajinnya mereka mengumpulkan bahan untuk ujian. Akibatnya, mutu materi dan proses pembelajaran sangat sulit untuk diases. Dosen menjadi pusat peran dalam pencapaian hasil pembelajaran dan seakan-akan menjadi satu-satunya sumber ilmu.

Perbaikan pola pembelajaran itu telah banyak dilakukan dengan kombinasi tatap muka, tanya jawab, dan pemberian tugas, yang kesemuanya dilakukan berdasarkan "pengalaman mengajar" dosen yang bersangkutan dan bersifat *trial-error*. Keluaran proses pembelajaran tetap tidak dapat diakses serta pelaksanaan perbaikannya memerlukan waktu lama. Pola pembelajaran di perguruan tinggi yang berlangsung saat sekarang perlu dikaji untuk dapat dipetakan pola keragaman penyimpangan, besarnya penyimpangan, dan persentase dari setiap kelompok pola, terhadap baku proses pembelajaran yang benar. Sementara itu, di NUS Singapura, melalui *Center for Development of Teaching and Learning* (<http://www.cdtl.nus.edu.sg>) telah disosialisasikan praktik pembelajaran dengan pendekatan penyelesaian problem secara kreatif. Mahasiswa dihadapkan pada masalah nyata di bidang sains dan diberi tugas untuk menyelesaikannya sebagai suatu cara pembelajaran. Dosen diharapkan dapat menerima kesalahan dalam proses pembelajaran sebagai hal yang wajar dan memotivasi untuk memperbaiki secara terus-menerus. Proses pembelajaran yang diterapkan benar-benar menyatu dengan materi pembelajaran yang diformat sesuai dengan dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif secara benar menurut empat pilar pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan di Indonesia di dalam proses dan materi pembelajaran dari KBK di perguruan tinggi tidak lagi berbentuk pembelajaran terpusat dosen (*teacher-centered learning/TCL*), tetapi diganti dengan menggunakan prinsip pembelajaran terpusat mahasiswa (*student-centered learning/SCL*) yang diramu untuk dapat diterapkan, serasi dengan keadaan Perguruan Tinggi di Indonesia.

5.3. Perubahan dari Pembelajaran Terpusat Dosen ke Arah Pembelajaran Terpusat Mahasiswa

Pola pembelajaran terpusat dosen seperti yang dipraktikkan pada saat ini sudah tidak memadai untuk mencapai tujuan pendidikan berbasis kompetensi. Berbagai alasan yang dapat dikemukakan, antara lain, adalah (i) perkembangan lptek dan seni yang sangat pesat dengan berbagai kemudahan untuk mengaksesnya merupakan materi pembelajaran yang sulit dapat dipenuhi oleh seorang dosen, (ii) perubahan kompetensi kekarwaan

yang berlangsung sangat cepat memerlukan materi dan proses pembelajaran yang lebih fleksibel, (iii) kebutuhan untuk mengakomodasi demokratisasi partisipatif dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Oleh karena itu, pembelajaran ke depan didorong menjadi pembelajaran terpusat mahasiswa (SCL) dengan memfokuskan pada tercapainya kompetensi yang diharapkan. Hal itu berarti mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai kompetensi yang diinginkan.

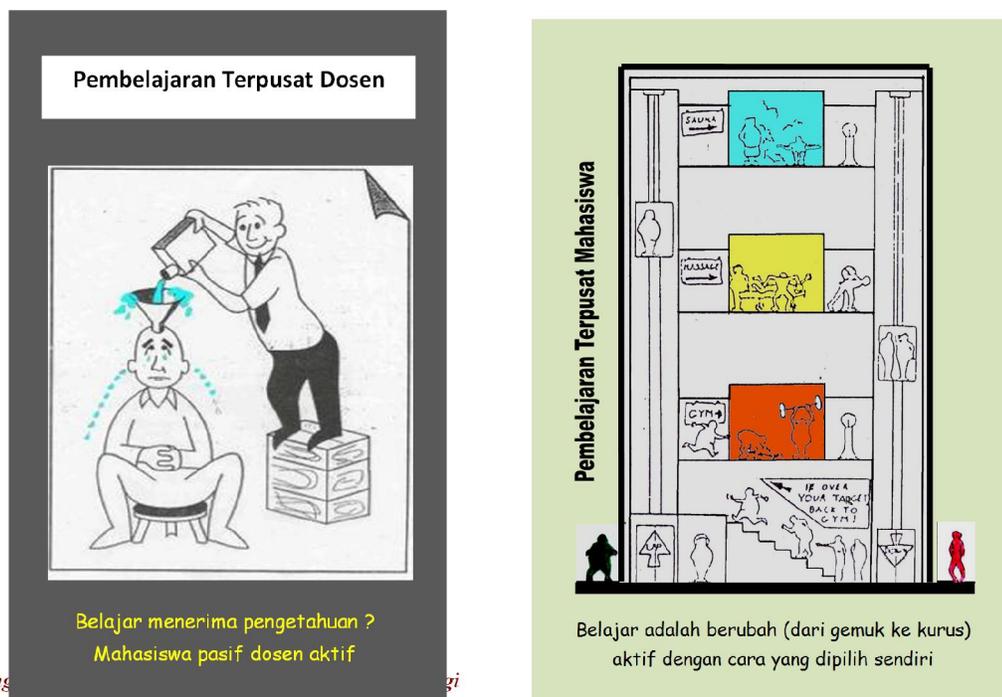
Perubahan pendekatan dalam pembelajaran dari pembelajaran terpusat dosen menjadi pembelajaran terpusat mahasiswa merupakan perubahan paradigma, yaitu perubahan dalam cara memandang beberapa hal dalam pembelajaran, yakni (a) **pengetahuan**, yakni dari pengetahuan yang dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi yang tinggal ditransfer dari dosen ke mahasiswa, menjadi pengetahuan dipandang sebagai hasil konstruksi atau hasil transformasi oleh pembelajar, (b) **belajar**, yakni menerima pengetahuan (pasif-reseptif) menjadi belajar adalah mencari dan mengonstruksi pengetahuan secara aktif dan spesifik (c) **pembelajaran**, yakni dosen menyampaikan pengetahuan atau mengajar (ceramah dan kuliah) menjadi dosen berpartisipasi bersama mahasiswa membentuk pengetahuan.

Dengan paradigma itu tiga prinsip yang harus ada dalam pembelajaran terpusat mahasiswa adalah (a) memandang pengetahuan sebagai satu hal yang belum lengkap; (b) memandang proses belajar sebagai proses untuk merekonstruksi dan mencari pengetahuan yang akan dipelajari; serta (c) memandang proses pembelajaran bukan sebagai proses pengajaran (*teaching*) yang dapat dilakukan secara klasikal dan bukan merupakan suatu proses untuk menjalankan sebuah instruksi baku yang telah dirancang. Proses pembelajaran adalah proses dosen menyediakan berbagai macam strategi dan metode pembelajaran dan paham akan pendekatan pembelajaran mahasiswanya untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa. Perbedaan pendekatan pembelajaran terpusat dosen dan pembelajaran terpusat mahasiswa dapat dirinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Rangkuman Perbedaan Pembelajaran Terpusat Dosen dan Pembelajaran Terpusat Mahasiswa

Pembelajaran Terpusat Dosen (<i>Teacher Centered Learning</i>)	Pembelajaran Terpusat Mahasiswa (<i>Student Centered Learning</i>)
Pengetahuan ditransfer dari dosen ke mahasiswa	Mahasiswa aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya
Mahasiswa menerima pengetahuan secara pasif	Mahasiswa aktif terlibat dalam mengelola pengetahuan
Menekankan pada penguasaan materi	Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tetapi juga mengembangkan karakter mahasiswa (<i>life-long learning</i>)
Biasa memanfaatkan media tunggal	Memanfaatkan banyak media (<i>multimedia</i>)
Fungsi guru sebagai pemberi informasi utama dan evaluator	Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan siswa
Proses pembelajaran dan penilaian dilakukan secara terpisah	Proses pembelajaran dan asesmen dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi
Menekankan pada jawaban yang benar	Penekanan pada proses pengembangan pengetahuan. Kesalahan dinilai dan dijadikan sumber pembelajaran

Gambar 7 Ilustrasi Pembelajaran Pembelajaran Terpusat Dosen dan Pembelajaran Terpusat Mahasiswa



Pada ilustrasi di atas tampak pada pembelajaran terpusat dosen (TCL) usaha keras dosen untuk memberikan sejumlah pengetahuan yang dianggap penting, hanya ditanggapi dengan kepasifan mahasiswa. Pada pembelajaran terpusat mahasiswa (SCL) digambarkan prinsip “belajar adalah berubah” (dari gemuk ke kurus), dengan cara yang dapat dipilih sendiri oleh mahasiswa sesuai dengan kapasitas dirinya, karena yang menjadikan dirinya “berubah” (kurus) adalah dirinya sendiri. Di dalam proses perubahan (pembelajaran) ini dapat ditanyakan: apa tugas dosen? Yang pasti adalah merancang berbagai metode agar peserta didik dapat memilih “cara belajar” yang tepat, dan dosen juga dapat bertindak sebagai “instruktur”, fasilitator, dan motivator. Di samping itu, pembelajaran dapat digambarkan sebagai sebuah sistem yang menyeluruh seperti Gambar 6 berikut ini.

Gambar 6. Ilustrasi Sistem Pembelajaran Berbasis Pembelajaran Terpusat Mahasiswa (TCL)



Perencanaan diturunkan dari ‘dokumen kurikulum’ dalam bentuk Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dan Satuan Acara Pengajaran (SAP), sedangkan proses (pengajaran) dipisah dengan proses penilaian hasil belajar lewat ujian. Dari seluruh

kegiatan ini akan dievaluasi serta disusun perbaikan (rekonstruksi) rencana mata kuliahnya.

Dalam proses ini, dosen melaksanakan perkuliahan selama 14-16 minggu, kemudian melakukan penilaian pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai mahasiswa baru dapat ditengarai setelah ujian tengah semester dilaksanakan, dimana pada saat itu proses pembelajaran telah berakhir. Permasalahan yang mungkin timbul dari proses itu adalah bahwa dosen sudah tidak memiliki waktu untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan mahasiswa.

Dalam sistem pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran terpusat mahasiswa, rencana pembelajaran difokuskan pada ‘paduan mahasiswa belajar’ dan proses menjadi satu dengan penilaian hasil belajar dengan mengembangkan sistem asesmen dalam kegiatan ‘pembelajaran’, proses belajar (*learning process*), bukan proses mengajar (*teaching process*). Proses belajar yang dilakukan mahasiswa dengan prinsip konstruktif menuntut mahasiswa untuk dapat unjuk kinerja di setiap pertemuan. Apabila terdapat masalah belajar mahasiswa, hal itu dapat dideteksi lebih awal dalam proses lewat asesmen tugas mahasiswa sehingga dapat dilakukan perbaikan saat itu. Mengenai sistemnya, pembelajaran terpusat mahasiswa dapat diikuti ilustrasi dalam Gambar 7 berikut ini.

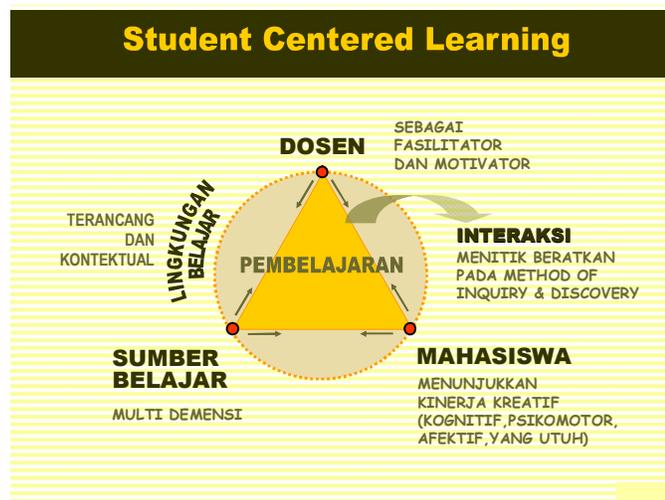
Gambar 7 : Ilustrasi Sistem Pembelajaran Berbasis Pembelajaran Terpusat Mahasiswa (SCL)



5.4. Pembelajaran Terpusat Mahasiswa (SCL)

Pembelajaran menurut UU Sisdiknas no 2 tahun 2003 dan UU Pendidikan Tinggi no 12 tahun 2012, dinyatakan bahwa "Pembelajaran adalah interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar, di dalam lingkungan belajar tertentu". Dengan mendeskripsikan setiap unsur yang terlibat dalam pembelajaran tersebut dapat ditengarai ciri pembelajaran terpusat mahasiswa (*student centered learning*) seperti pada Gambar 8 dibawah ini.

Gambar 8. Ciri Pembelajaran Terpusat Mahasiswa (SCL)



Ciri metode pembelajaran terpusat mahasiswa (SCL) sesuai dengan unsurnya dapat diperinci sebagai berikut: **dosen** berperan sebagai fasilitator dan motivator; **mahasiswa** harus menunjukkan kinerja, yang bersifat kreatif yang mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif secara utuh; **proses interaksinya** menitikberatkan pada metode penggalian dan penemuan (*method of inquiry and discovery*); **sumber belajarnya** bersifat multidimensi, artinya bisa didapat dari mana saja; dan **lingkungan belajarnya** harus terancang dan kontekstual.

5.5 Peran Dosen dalam Pembelajaran Terpusat Mahasiswa (SCL)

Di dalam proses pembelajaran terpusat mahasiswa (SCL), dosen masih memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembelajaran terpusat mahasiswa (SCL), yaitu

- a. bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran;
- b. mengkaji kompetensi mata kuliah yang perlu dikuasai mahasiswa pada akhir pembelajaran;
- c. merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dituntut mata kuliah;
- d. membantu mahasiswa mengakses, menata, dan memproses informasi untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari; dan
- e. mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur.

Sementara itu, peran yang harus dilakukan mahasiswa dalam pembelajaran terpusat mahasiswa (SCL) adalah

- a. mengkaji kompetensi mata kuliah yang dipaparkan dosen;

- b. mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen;
- c. membuat rencana pembelajaran untuk mata kuliah yang diikutinya; dan
- d. belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam pemecahan masalah serta lebih penting lagi terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi, seperti analisis, sintesis, dan evaluasi), baik secara individual maupun berkelompok.

BAB VI

RAGAM METODE PEMBELAJARAN TERPUSAT MAHASISWA

Terdapat beragam metode pembelajaran terpusat mahasiswa, di antaranya adalah (1) diskusi kelompok kecil (*small group discussion*); (2) bermain peran dan simulasi (*role-play & simulation*); (3) studi kasus (*case study*); (4) *discovery learning* (DL); (5) *self-directed learning* (SDL); (6) belajar Kooperatif (*cooperative learning/CL*); (7) belajar kolaboratif (*collaborative Learning/CbL*); (8) pembelajaran kontekstual (*contextual learning/CI*); (9) pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning/PjBL*); dan (10) pembelajaran dan penggalian berbasis masalah (*problem-based learning/inquiry*). Selain kesepuluh model tersebut, masih banyak model pembelajaran lain yang belum dapat disebutkan satu persatu, bahkan setiap pendidik/dosen dapat pula mengembangkan model pembelajarannya sendiri. Berikut akan disampaikan beberapa dari kesepuluh model pembelajaran yang telah disampaikan di atas.

6.1 Diskusi Kelompok Kecil (Small Group Discussion)

Diskusi adalah salah satu elemen belajar secara aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran terpusat mahasiswa yang lain, seperti CL, CbL, dan PBL. Mahasiswa peserta kuliah diminta membuat kelompok kecil (5 sampai 10 orang) untuk mendiskusikan bahan yang diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh anggota kelompok tersebut. Dengan aktivitas kelompok kecil, mahasiswa akan belajar (a) menjadi pendengar yang baik, (b) bekerjasama untuk tugas bersama, (c) memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif, (d) menghormati perbedaan pendapat, (e) mendukung pendapat dengan bukti, dan (f) menghargai sudut pandang yang bervariasi (gender, budaya, dan lain-lain). Adapun aktivitas diskusi kelompok kecil dapat berupa (a) membangkitkan ide, (b) menyimpulkan poin penting, (c) mengakses tingkat keahlian dan pengetahuan, (d) mengkaji kembali topik di kelas sebelumnya, (e) menelaah latihan, kuis, tugas menulis, (f) memproses capaian pembelajaran pada akhir

kelas, (g) memberi komentar tentang jalannya kelas, (h) membandingkan teori, isu, dan interpretasi, (i) menyelesaikan masalah, dan (j) curah pendapat (*Brainstroming*).

6.2 Bermain Peran dan Simulasi (*role-play & simulation*)

Simulasi adalah model yang membawa situasi yang mirip dengan sesungguhnya ke dalam kelas. Misalnya, untuk mata kuliah aplikasi instrumentasi, mahasiswa diminta membuat perusahaan fiktif yang bergerak di bidang aplikasi instrumentasi. Kemudian, perusahaan tersebut diminta melakukan hal yang sebagaimana dilakukan oleh perusahaan sesungguhnya dalam memberikan jasa kepada kliennya, misalnya, melakukan proses pelelangan (*bidding*). Simulasi dapat berbentuk (a) permainan peran (*role playing*). Dalam contoh di atas, setiap mahasiswa dapat diberi peran masing-masing, misalnya, sebagai direktur, perekayasa (*engineer*), dan bagian pemasaran; (b) latihan dan permainan simulasi (*simulation exercices and simulation games*); dan (c) model komputer. Simulasi dapat mengubah cara pandang (*mindset*) mahasiswa dengan jalan (a) mempraktekkan kemampuan umum (misalnya komunikasi verbal dan nonverbal), (b) mempraktekkan kemampuan khusus, (c) mempraktekkan kemampuan tim, (d) mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah (*problem-solving*), (e) menggunakan kemampuan sintesis, dan (f) mengembangkan kemampuan empati.

6.3 Discovery Learning (DL)

Discovery Learning (DL) adalah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan dosen maupun yang dicari sendiri oleh mahasiswa, untuk membangun pengetahuan dengan cara belajar mandiri.

6.4 Self-Directed Learning (SDL)

Self-Directed Learning (SDL) adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, dilakukan semuanya oleh individu yang bersangkutan. Sementara itu dosen hanya bertindak sebagai fasilitator, yang memberi

arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu mahasiswa tersebut.

Metode belajar itu bermanfaat untuk menyadarkan dan memberdayakan mahasiswa, bahwa belajar adalah tanggung jawab mereka sendiri. Dengan kata lain, individu mahasiswa didorong untuk bertanggungjawab terhadap semua pikiran dan tindakan yang dilakukannya. Metode pembelajaran *Student Directed Learning* (SDL) dapat diterapkan apabila asumsi berikut sudah terpenuhi, yaitu sebagai orang dewasa, kemampuan mahasiswa semestinya bergeser dari orang yang tergantung pada orang lain menjadi individu yang mampu belajar mandiri. Prinsip yang digunakan di dalam *Student Directed Learning* (SDL) adalah (a) pengalaman merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat, (b) kesiapan belajar merupakan tahap awal menjadi pembelajar mandiri, dan (c) orang dewasa lebih tertarik belajar dari permasalahan daripada dari isi mata kuliah. Pengakuan, penghargaan, dan dukungan terhadap proses belajar orang dewasa perlu diciptakan dalam lingkungan belajar. Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa harus memiliki semangat yang saling melengkapi dalam melakukan pencarian pengetahuan.

6.5 Belajar Kooperatif (*Cooperative Learning/CL*)

Belajar Kooperatif (*Cooperative Learning/CL*) adalah metode belajar berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah/kasus atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok itu terdiri atas beberapa orang mahasiswa, yang memiliki kemampuan akademik yang beragam.

Metode itu sangat terstruktur karena pembentukan kelompok, materi yang dibahas, langkah-langkah diskusi, serta produk akhir yang harus dihasilkan, ditentukan dan dikontrol oleh dosen. Dalam hal ini, mahasiswa hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh dosen. Pada dasarnya belajar kooperatif (CL) seperti ini merupakan perpaduan antara pembelajaran terpusat dosen (*teacher-centered*) dan pembelajaran terpusat mahasiswa (*student-centered learning*). Metode itu bermanfaat untuk membantu menumbuhkan dan mengasah (a) kebiasaan belajar

aktif pada diri mahasiswa, (b) rasa tanggung jawab individu dan kelompok mahasiswa, (c) kemampuan dan keterampilan bekerja sama antar mahasiswa, dan (d) keterampilan sosial mahasiswa.

6.6 Belajar Kolaboratif (*Collaborative Learning/CbL*)

Belajar Kolaboratif (*Collaborative Learning/CbL*) adalah metode belajar yang menitikberatkan pada kerja sama antarmahasiswa yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Masalah, tugas, dan kasus memang berasal dari dosen dan bersifat terbuka (*open ended*). Akan tetapi, pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur kerja kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi atau kerja kelompok, sampai dengan bagaimana hasil diskusi atau kerja kelompok ingin dinilai oleh dosen, ditentukan melalui konsensus bersama antaranggota kelompok.

6.7 Pembelajaran Kontekstual (*Contextual Instruction/CI*)

Pembelajaran Kontekstual (*Contextual Learning/CI*) adalah konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan isi mata kuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat, pelaku kerja profesional atau manajerial, wirausaha, maupun investor. Misalnya, apabila kompetensi yang dituntut mata kuliah adalah mahasiswa dapat menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi proses transaksi jual beli, maka dalam pembelajarannya, selain konsep transaksi itu dibahas dalam kelas, juga diberikan contoh dan didiskusikan. Mahasiswa juga diberi tugas dan kesempatan untuk terjun langsung di pusat-pusat perdagangan untuk mengamati secara langsung proses transaksi jual beli tersebut, bahkan terlibat langsung sebagai salah satu pelakunya, sebagai pembeli, misalnya. Pada saat itu mahasiswa dapat melakukan pengamatan langsung dan mengkajinya dengan berbagai teori yang ada, sampai ia dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya proses transaksi jual

beli. Hasil keterlibatan, pengamatan dan kajiannya itu selanjutnya dipresentasikan di dalam kelas, untuk dibahas dan menampung saran dan masukan lain dari seluruh anggota kelas. Pada intinya dengan Pembelajaran Kontekstual (CI), dosen dan mahasiswa memanfaatkan pengetahuan secara bersama-sama untuk mencapai kompetensi yang dituntut oleh mata kuliah, serta memberikan kesempatan pada semua orang yang terlibat dalam pembelajaran untuk belajar satu sama lain.

6.8 Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning/PjBL*)

Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning/PjBL*) adalah metode belajar yang sistematis, yang melibatkan mahasiswa dalam belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian atau penggalian (*inquiry*) yang panjang dan terstruktur terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks serta tugas dan produk yang dirancang dengan sangat hati-hati.

6.9 Pembelajaran dan Penggalian Berbasis Masalah (*Problem-Based Learning/Inquiry*)

Pembelajaran dan Penggalian Berbasis Masalah (*Problem-Based Learning/Inquiry*) adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian atau penggalian informasi (*inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Pada umumnya, terdapat empat langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam metode ini, yaitu (a) menerima masalah yang relevan dengan salah satu atau beberapa kompetensi yang dituntut mata kuliah dari dosennya; (b) melakukan pencarian data dan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah; (c) menata data dan mengaitkan data dengan masalah; dan (d) menganalisis strategi pemecahan masalah pembelajaran dan penggalian berbasis masalah.

URAIAN RINGKAS CIRI BEBERAPA MODEL BELAJAR

No	MODEL BELAJAR	YANG DILAKUKAN MAHASISWA	YANG DILAKUKAN DOSEN
1	Small Group Discussion	<ul style="list-style-type: none"> membentuk kelompok (5-10) memilih bahan diskusi mempresentasikan paper dan mendiskusikan di kelas 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat rancangan bahan diskusi dan aturan diskusi. Menjadi moderator dan sekaligus mengulas pada setiap akhir session diskusi mahasiswa.
2	Simulasi	<ul style="list-style-type: none"> mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya. atau mempraktekan/mencoba berbagai model (komputer) yang telah disiapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Merancang situasi/ kegiatan yang mirip dengan yang sesungguhnya, bisa berupa bermain peran, model komputer, atau berbagai latihan simulasi. Membahas kinerja mahasiswa.
3	Discovery Learning	<ul style="list-style-type: none"> mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan data, atau petunjuk (metode) untuk menelusuri suatu pengetahuan yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Memeriksa dan memberi ulasan terhadap hasil belajar mandiri mahasiswa.

No	MODEL BELAJAR	YANG DILAKUKAN MAHASISWA	YANG DILAKUKAN DOSEN
4	Self-Directed Learning	<ul style="list-style-type: none"> merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan, dan menilai pengalaman belajarnya sendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> sebagai fasilitator, memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu mahasiswa.
5	Cooperative Learning	<ul style="list-style-type: none"> Membahas dan menyimpulkan masalah/ tugas yang diberikan dosen secara berkelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> merancang dan dimonitor proses belajar dan hasil belajar kelompok mahasiswa. Menyiapkan suatu masalah/ kasus atau bentuk tugas untuk diselesaikan oleh mahasiswa secara berkelompok.
6	Collaborative Learning	<ul style="list-style-type: none"> Bekerjasama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas Membuat rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan konsensus kelompoknya sendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> Merancang tugas yang bersifat open ended. Sebagai fasilitator dan motivator.

No	MODEL BELAJAR	YANG DILAKUKAN MAHASISWA	BENTUK KEGIATAN BELAJAR
7	Contextual Instruction	<ul style="list-style-type: none"> Membahas konsep (teori) kaitannya dengan situasi nyata Melakukan studi lapang/ terjun di dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori. 	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, atau kerja profesional, atau manajerial, atau entrepreneurial. Menyusun tugas untuk studi mahasiswa terjun ke lapangan
8	Project Based Learning	<ul style="list-style-type: none"> Mengerjakan tugas (berupa proyek) yang telah dirancang secara sistematis. Menunjukkan kinerja dan bertanggung jawabkan hasil kerjanya di forum. 	<ul style="list-style-type: none"> Merancang su atu tugas (proyek) yang sistematis agar mahasiswa belajar pengetahuan dan ketrampilan melalui proses pencarian/ penggalian (inquiry), yang terstruktur dan kompleks. Merumuskan dan melakukan proses pembimbingan dan asesmen.
9	Problem Based Learning	<ul style="list-style-type: none"> Belajar dengan menggali/ mencari informasi (inquiry) serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual/ yang dirancang oleh dosen . 	<ul style="list-style-type: none"> Merancang tugas untuk mencapai kompetensi tertentu Membuat petunjuk (metode) untuk mahasiswa dalam mencari pemecahan masalah yang dipilih oleh mahasiswa sendiri atau yang ditetapkan.

Tabel 10. Ringkasan Model Pembelajaran

BAB VII**PENYUSUNAN RANCANGAN PEMBELAJARAN TERPUSAT MAHASISWA
(SCL)**

Pada dasarnya menyusun rancangan pembelajaran adalah menyusun program untuk keberhasilan capaian pembelajaran yang dicanangkan bagi peserta didik. Orientasi rancangan itu lebih menekankan pada pemberian informasi dan panduan bagi mahasiswa agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri dan menyusun program pribadinya dalam belajar guna memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal itu yang membedakannya dengan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dan Satuan Acara Pengajaran (SAP) yang selama ini menjadi standar di semua perguruan tinggi di Indonesia, termasuk standar penilaian dosen/program studi oleh BAN PT. Pada GBPP dan SAP yang ditekankan adalah aktivitas yang akan dikerjakan dosen selama satu semester, sedangkan Rancangan Pembelajaran (RP) pembelajaran terpusat mahasiswa (SCL) yang diusulkan ini lebih menekankan pada aktivitas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa/peserta didik; jadi, bukan rancangan panduan dosen mengajar, tetapi rancangan panduan mahasiswa belajar. Berikut ini disajikan sebuah format rancangan pembelajaran yang berisi unsur-unsur esensial yang minimal yang bisa dikembangkan lebih lengkap oleh dosen atau program studinya.

RENCANA PEMBELAJARAN SCL

Mata kuliah : Sem sks :
 Jurusan : Dosen :
 Capaian Pembelajaran :

(1) MINGGU KE	(2) KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	(3) BAHAN KAJIAN	(4) BENTUK PEMBELAJARAN	(5) KRITERIA PENILAIAN	(6) BOBOT NILAI

CARA MENGISI RENCANA PEMBELAJARAN

NOMOR KOLOM	JUDUL KOLOM	PENJELASAN PENGISIAN
1	MINGGU KE	Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu semester)(bisa 1/2/3/4 mingguan).
2	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	Rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (hard skills & soft skills). Merupakan tahapan kemampuan yang diharapkan dapat mencapai kompetensi mata kuliah ini diakhir semester.
3	BAHAN KAJIAN (materi ajar)	Bisa diisi pokok bahasan / sub pokok bahasan, atau topik bahasan. (dengan asumsi tersedia diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan)
4	BENTUK PEMBELAJARAN	bisa berupa : ceramah, diskusi, presentasi tugas, seminar, simulasi, responsi, praktikum, latihan, kuliah lapang, praktek bengkel, survai lapangan, bermain peran, atau gabungan berbagai bentuk. Penetapan bentuk pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan diatas akan tercapai dengan bentuk/ model pembelajaran tersebut.
5	KRITERIA PENILAIAN (indikator)	berisi : indikator yang dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif misal ketepatan analisis, kerapian sajian, Kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, juga bisa juga yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan / unsur yang dibahas, kebenaran hitungan).
6	BOBOT NILAI	disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian kompetensi mata kuliah ini.

Tabel 8 Rancangan Pembelajaran SCL

Pengisian rancangan pembelajaran tersebut dimulai dengan mengisi kompetensi mata kuliah, yang diambil dari peta struktur kurikulum program studi. Dalam model ini dosen tidak menetapkan sendiri kompetensi mata kuliahnya, tetapi mendapatkan kompetensi tersebut dari program studi yang bersangkutan. Setelah mengisi kompetensi mata kuliah, langkah selanjutnya adalah menjabarkan atau menderivasikan kompetensi

tersebut ke dalam beberapa kemampuan akhir yang diharapkan. Semua kemampuan akhir tersebut, jika kembali disatukan, harus menjadi kompetensi mata kuliah yang ditetapkan di atas.

Setelah semua kemampuan akhir dituliskan, pengisian rancangan pembelajaran itu dapat dimulai dengan mengisi kolom (3) materi ajar/ bahan kajian. Untuk mengisi kolom (3), dosen dapat menganalisis dengan pertanyaan “Materi apa yang diperlukan agar kompetensi yang dituju dapat dicapai?” Langkah selanjutnya adalah mengisi kolom (4) bentuk/metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan akhir yang akan dituju. Kemudian, langkah berikutnya adalah mengisi kolom (5) yang berisi tentang kriteria atau indikator dari setiap kemampuan akhir yang akan dituju. Setelah kolom (3) sampai dengan kolom (5) terisi, mulailah dilakukan analisis mengenai bobot setiap kemampuan akhir dalam mencapai kompetensi mata kuliah dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya. Rancangan pembelajaran tersebut kemudian dilampiri dengan rancangan tugas. Setiap kemampuan yang akan dituju memerlukan desain tugas tertentu sehingga dapat mengajak mahasiswa menunjukkan kinerjanya. Untuk itu, dibuatkan format rancangan tugas sebagaimana yang tertuang pada Gambar 10 di bawah ini.

FORMAT RANCANGAN TUGAS	
MATA KULIAH	:
SEMESTER	: sks :
MINGGU KE	: Tugas ke :
1. TUJUAN TUGAS :	
.....	
2. URAIAN TUGAS :	
a. Obyek garapan :	
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan :	
c. Metode/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan :	
d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/ dikerjakan :	
3. KRITERIA PENILAIAN :	
a.	%
b.	%
c.	%

PENJELASAN FORMAT TUGAS :

- 1. TUJUAN TUGAS :**
adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa bila ia berhasil mengerjakan tugas ini (hard skill dan soft skill)
- 2. URAIAN TUGAS :**
 - a. Obyek garapan:** berisi deskripsi obyek material yang akan distudi dalam tugas ini (misal tentang penyakit kulit/ manajemen RS/ narkoba/ bayi/ perawatan darurat/ dll)
 - b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:**
uraian besaran, tingkat kerumitan, dan keluasan masalah dari obyek material yang harus distudi, tingkat ketajaman dan kedalaman studi yang distandarkan. (misal tentang perawatan bayiprematur, distudi tentang hal yang perlu diperhatikan, syarat-syarat yang harus dipenuhi - kecermatan, kecepatan, kebenaran prosedur ,dll) Bisa juga ditetapkan hasilnya harus dipresentasi di forum diskusi/ seminar.
 - c. Metode/ cara pengerjaan tugas:**
berupa petunjuk tentang teori /teknik / alat yang sebaiknya digunakan, alternatif langkah-langkah yang bisa ditempuh, data dan buku acuan yang wajib dan yang disarankan untuk digunakan, ketentuan dikerjakan secara kelompok/ individual.
 - d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan:**
adalah uraian tentang bentuk hasil studi/ kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan (misal hasil studi tersaji dalam paper minimum 20 halaman termasuk skema, tabel dan gambar, dengan ukuran kertas kuarto, diketik dengan tipe dan besaran huruf yang tertentu, dan mungkin dilengkapi sajian dalam bentuk CD dengan format powerpoint).
- 3. KRITERIA PENILAIAN :**
berisi butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi yang telah dirumuskan.

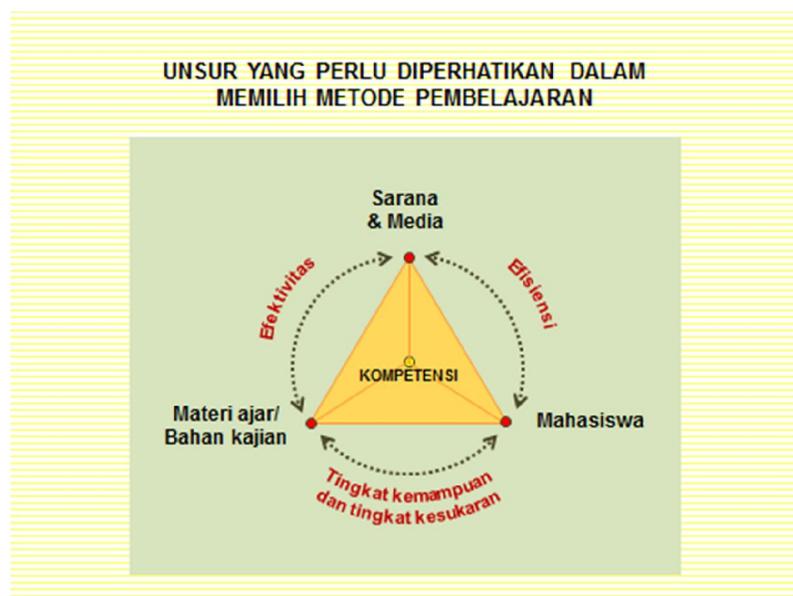
Gambar 10 Format Rancangan Tugas

Rancangan tugas terdiri atas unsur (1) tujuan tugas, (2) uraian tugas, dan (3) kriteria penilaian. Tujuan tugas ditulis berdasarkan kemampuan akhir yang akan dituju (diambilkan dari tabel rancangan pembelajaran). Tujuan tugas berisi rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa apabila ia berhasil mengerjakan tugas tersebut. Uraian tugas terdiri atas objek garapan yang berisi deskripsi objek materi yang akan dipelajari dalam tugas itu (misalnya, mengenai penyakit kulit, tanaman industry, dan narkoba). Sementara itu, yang harus dikerjakan dan batasan-batasannya berisi uraian besaran, tingkat kerumitan, dan keluasan masalah dari objek material yang harus dipelajari, tingkat ketajaman dan kedalaman studi yang distandarkan. Metode pengerjaan tugas berupa petunjuk mengenai teori, teknik, dan alat yang sebaiknya digunakan tentang alternatif langkah-langkah yang dapat ditempuh, data dan buku acuan yang wajib dan yang disarankan untuk digunakan, ketentuan cara mengerjakannya, secara berkelompok atau individual. Deskripsi keluaran tugas yang dihasilkan, berisi uraian tentang bentuk yang harus ditunjukkan atau disajikan (misalnya hasil studi tersaji dalam makalah minimum 20 halaman termasuk skema, tabel dan gambar; ukuran kertas kuarto yang diketik dengan tipe huruf

Times New Roman atau Arial). Sementara itu, kriteria penilaian berisi butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi yang telah dirumuskan.

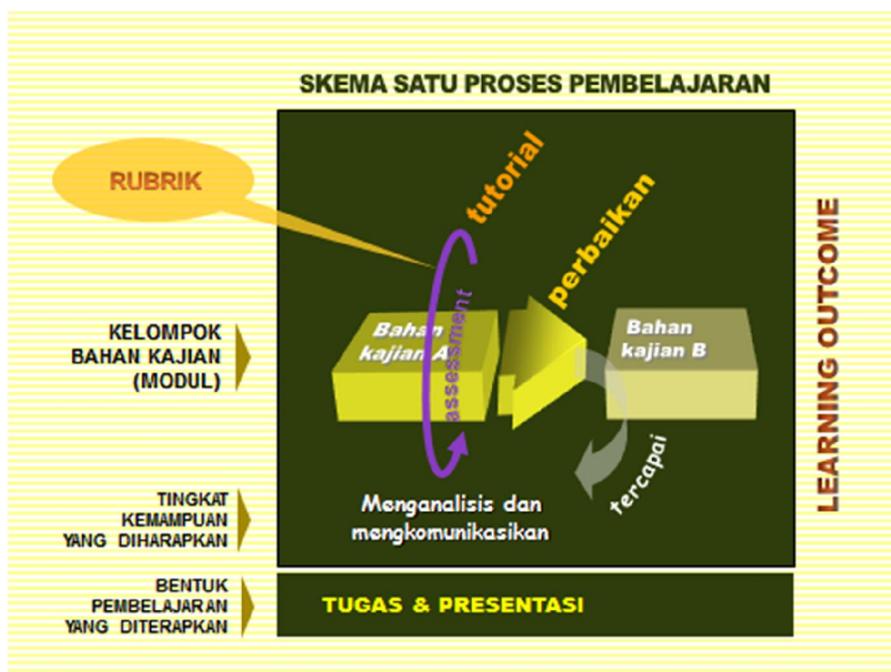
Dosen dalam memilih metode pembelajaran perlu memperhatikan beberapa unsur, yaitu (1) mahasiswa, (2) materi ajar/bahan kajian, dan (c). sarana dan media pembelajaran. Yang terpenting dalam pemilihan wujud ketiga unsur tersebut, dosen perlu berfokus pada kompetensi/kemampuan yang akan dicapai. Agar metode pembelajarannya efektif untuk mencapai kompetensi, dosen perlu mempertimbangkan unsur sarana dan media, terkait dengan materi ajarnya, misalnya untuk mengajarkan warna, tayangan, atau penyajian visual yang nyata akan lebih efektif penyerapannya daripada dengan bahasa lisan. Agar pembelajaran lebih efisien, dosen perlu mempertimbangkan sarana dan media tersebut, terkait dengan jumlah mahasiswa. Misalnya, susunan ruang dan besaran ruang menentukan efisiensi pembelajarannya.

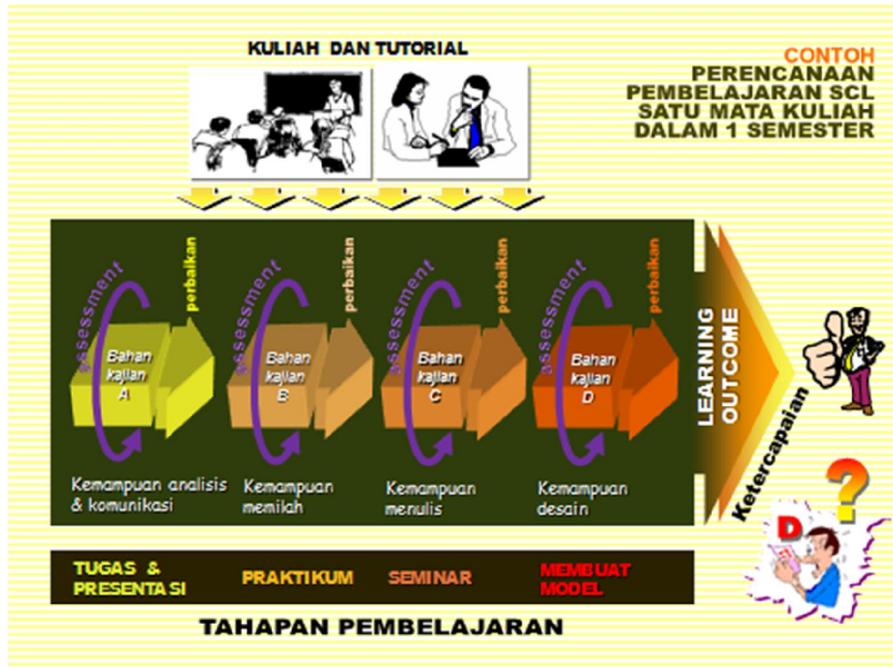
Untuk keberhasilannya dalam mencapai kompetensi, dosen perlu mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik dan tingkat kesukaran atau kompleksitas materi ajarnya. Gambar 8 dapat memperjelas hal ini.



Gambar 8 Unsur yang Dipertimbangkan dalam Memilih Metode Pembelajaran

Penyusunan rancangan pembelajaran terpusat mahasiswa memerlukan kreativitas dosen dalam menentukan strategi agar peserta didik memenuhi capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang diharapkan. Heterogenitas kemampuan peserta didik, prasarana dan sarana yang dibutuhkan, jumlah mahasiswa, dan karakteristik bidang keilmuan tentu menuntut pemilihan strategi yang tepat. Dalam pembelajaran terpusat mahasiswa yang tidak hanya menekankan hasil belajar, tetapi juga proses belajar dalam membentuk kemampuan peserta didik. Dengan perubahan paradigma dalam pembelajaran yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini disajikan secara diagramatik satu model proses pembelajaran.





Gambar 9 dan 10 Contoh Skema Proses Pembelajaran

BAB VIII

ALTERNATIF PENILAIAN DALAM PEMBELAJARAN

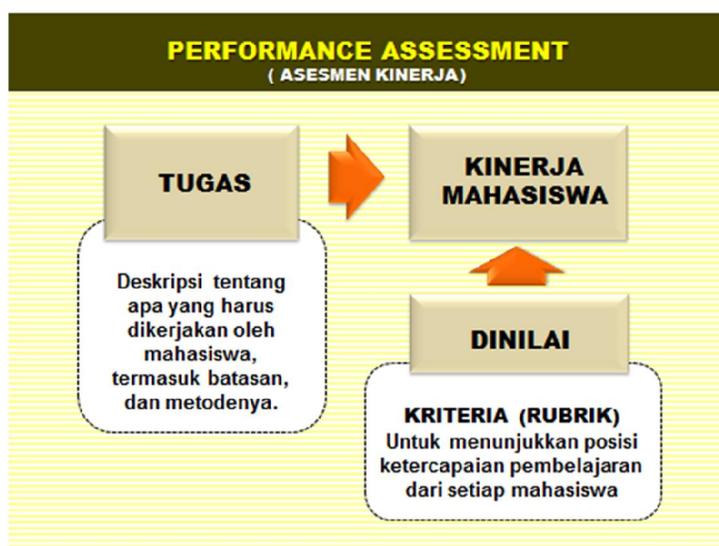
Penilaian adalah tugas dosen yang dipandang cukup sulit bagi dosen. Beberapa permasalahan sering muncul dalam proses penilaian, di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Pemberian angka pada hasil belajar mahasiswa apakah termasuk penilaian? Banyak di antara dosen yang terjebak hanya memberikan angka pada proses penilaiannya. Padahal, esensi dari penilaian adalah memberikan umpan balik pada kinerja atau kompetensi yang ditunjukkan mahasiswa agar dapat mengarah pada ketercapaian keluaran dan capaian pembelajaran. Angka bukanlah tujuan akhir dari penilaian.
- 2) Jenis kemampuan apa yang kita nilai dari mahasiswa? Dosen sering mengalami kesulitan untuk menilai kemampuan siswa. Tidak jarang dosen kurang mampu membedakan kemampuan akhir yang akan dinilainya. Misalnya, pada saat hendak menilai kognitif, dosen sering dipengaruhi oleh kemampuan afektif mahasiswa seperti sikap dan penampilan mahasiswa.
- 3) Apakah teknik penilaian yang kita jalankan sudah tepat sesuai dengan kemampuan mahasiswa secara nyata dan benar? Dosen juga sering mengalami kesulitan dalam menentukan metode penilaian yang tepat untuk menilai kompetensi tertentu. Misalnya, pada saat menilai psikomotorik, dosen masih sering melakukan ujian tertulis.
- 4) Bagaimana cara penilaian: makalah, syair, matematika, maket, patung, ujian tulis atau uraian. Apakah sama caranya?
- 5) Apakah tes dan ujian tulis merupakan satu-satunya cara yang tepat untuk melihat kemampuan atau kompetensi mahasiswa? Masih banyak di antara dosen yang selalu menggunakan metode ujian tertulis mulai dari awal penilaian sampai ujian akhir.

Proses penilaian dalam pembelajaran terpusat mahasiswa, seperti dalam gambar skematik di atas (gambar 10), dilakukan selama proses dengan melihat perkembangan hasil di beberapa tahapan pembelajaran. Dalam proses penilaian itu proses asesmen menjadi sangat penting, yaitu dengan memeriksa, mengkaji, memberi arahan dan

masuk ke peserta didik, dan menggunakan suatu instrumen penilaian sebagai tolak ukur ketercapaian kemampuan.

Dalam hal ini, proses asesmen yang diusulkan dan dianggap tepat dalam metode pembelajaran terpusat mahasiswa adalah model asesmen yang disebut **Asesmen Kinerja** (*authentic assessment* atau *performance assessment*), yaitu asesmen yang terdiri atas tiga aktivitas dasar, yakni dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, penilaian berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut rubrik. Proses asesmen itu secara skematik dapat disimak pada Gambar 11 berikut ini.



Gambar 11 Skema Asesmen Kinerja

Asesmen Kinerja (*authentic assessment* atau *performance assessment*) didefinisikan sebagai "Penilaian terhadap proses perolehan, penerapan pengetahuan dan ketrampilan, melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam proses maupun produk".

Rubrik merupakan panduan asesmen yang menggambarkan kriteria yang digunakan dosen dalam menilai dan memberi tingkatan ketercapaian hasil belajar atau kerja mahasiswa. Dengan demikian rubrik memuat daftar karakteristik unjuk kerja yang diharapkan terwujud /tertampilkan dalam proses

dan hasil kerja mahasiswa, dan dijadikan panduan untuk mengevaluasi setiap karakteristik tersebut.

Manfaat pemakaian rubrik di dalam proses penilaian adalah:

- a. dapat menjelaskan deskripsi tugas;
- b. memberikan informasi bobot penilaian;
- c. Dalam proses belajar, mahasiswa memperoleh umpan balik yang cepat dan akurat; dan
- d. penilaian lebih objektif dan konsisten karena indikator kinerja diketahui secara terbuka oleh peserta didik dan dosen sejak awal.

Secara konseptual rubrik memiliki tiga macam bentuk, yaitu (a) rubrik deskriptif, (b) rubrik holistic, dan (c) rubrik skala persepsi. Di dalam pembelajaran sering digunakan rubrik deskriptif dan rubrik holistik, sedangkan rubrik skala persepsi lebih banyak digunakan untuk melakukan penelitian atau survei.

8.1 Rubrik Deskriptif

Rubrik deskriptif memiliki empat komponen atau bagian yaitu, (1) deskripsi tugas, (2) skala nilai, (3) dimensi, dan (4) deskripsi dimensi. Bentuk umum rubrik deskriptif ditunjukkan pada Gambar 11. Keempat komponen tersebut adalah sebagai berikut

- (1) **Deskripsi tugas:** menjelaskan tugas atau objek yang akan dinilai atau dievaluasi. Deskripsi tugas itu harus benar-benar jelas agar mahasiswa memahami tugas yang diberikan;
- (2) **Skala nilai:** menyatakan tingkat capaian mahasiswa dalam mengerjakan tugas untuk dimensi tertentu. Skala nilai biasanya dibagi menjadi beberapa tingkat, misalnya dibagi menjadi tiga tingkat yaitu sangat memuaskan, memuaskan, dan cukup. Jumlah skala nilai ini bersifat fleksibel, dapat diperbanyak atau dikurangi sesuai kebutuhan. Pada umumnya tiga skala nilai telah dapat mencukupi keperluan penilaian;
- (3) **Dimensi:** dimensi menyatakan aspek-aspek yang dinilai dari pelaksanaan tugas yang diberikan. Sebagai contoh, dalam tugas presentasi, aspek-

aspek yang dinilai adalah pemahaman, pemikiran, komunikasi, penggunaan media visual, dan kemampuan presentasi. Aspek-aspek yang dinilai dapat saja diberikan bobot yang berbeda dalam penilaian, misalnya aspek pemikiran diberi bobot lebih tinggi daripada aspek lain dan kemampuan presentasi tidak terlalu tinggi dibandingkan aspek yang lain. Contoh: diberikan bobot 30% untuk pemikiran, 10% untuk kemampuan presentasi, dan 20% untuk yang lainnya. Pemberian bobot bergantung pada kepentingan penilaian; dan

- (4) **Tolok Ukur Dimensi** atau **tolok ukur penilaian**: merupakan deskripsi yang menjelaskan bagaimana karakteristik dari hasil kerja mahasiswa. Deskripsi itu digunakan untuk standar yang menentukan pencapaian skala penilaian, misalnya, nilai sangat memuaskan, memuaskan, atau cukup.

Rubrik deskriptif memberikan deskripsi karakteristik atau tolok ukur penilaian pada setiap skala nilai yang diberikan. Format itu banyak dipakai dosen dalam menilai tugas mahasiswa karena memberikan panduan yang lengkap untuk menilai hasil kerja mahasiswa. Meskipun diperlukan waktu untuk menyusunnya, manfaat rubrik deskriptif bagi dosen dan mahasiswa (sebagai umpan balik atas kinerja) melebihi usaha untuk membuatnya.

Deskripsi tugas :

DIMENSI	Skala 1	Skala 2	Skala 3
Dimensi 1	Tolok ukur Dimensi	Tolok ukur Dimensi	Tolok ukur Dimensi
Dimensi 2	Tolok ukur Dimensi	Tolok ukur Dimensi	Tolok ukur Dimensi
Dimensi 3	Tolok ukur Dimensi	Tolok ukur Dimensi	Tolok ukur Dimensi
Dimensi 4	Tolok ukur Dimensi	Tolok ukur Dimensi	Tolok ukur Dimensi
Dimensi 5	Tolok ukur Dimensi	Tolok ukur Dimensi	Tolok ukur Dimensi

Gambar 11 Bentuk Umum Rubrik Deskriptif

8.2 Rubrik Holistik

Berbeda dengan rubrik deskriptif yang memiliki beberapa skala nilai, rubrik holistik hanya memiliki satu skala nilai, yaitu skala tertinggi. Isi dari deskripsi dimensinya adalah kriteria dari suatu kinerja untuk skala tertinggi. Apabila mahasiswa tidak memenuhi kriteria tersebut, penilai memberi komentar berupa alasan mengapa tugas mahasiswa tidak mendapatkan nilai maksimal.

Gambar 12 Bentuk Umum dari Rubrik Holistik.

Deskripsi tugas

Dimensi	Kriteria	Komentar	Nilai
Dimensi 1	Harapan Dimensi 1		
Dimensi 2	Harapan Dimensi 2		
Dimensi 3	Harapan Dimensi 3		
Dimensi 4	Harapan Dimensi 4		
Dimensi 5	Harapan Dimensi 5		

Kelemahan rubrik holistik adalah dosen masih harus menuliskan komentar atas capaian mahasiswa pada setiap dimensi apabila mahasiswa tidak mencapai kriteria maksimum. Karena tidak ada panduan terperinci, mungkin sekali terjadi ketidakkonsistenan pemberian komentar atau umpan balik kepada mahasiswa. Dosen perlu menuliskan komentar yang sama pada tugas mahasiswa yang menunjukkan karakteristik yang sama sehingga akan memerlukan lebih banyak waktu. Meskipun perlu diakui bahwa menyusun rubrik holistik lebih sederhana daripada rubrik deskriptif, waktu diperlukan dalam melakukan penilaian mungkin sekali lebih lama.

8.3 Cara membuat Rubrik

Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam membuat rubrik adalah sebagai berikut

8.3.1 Mencari berbagai model rubrik

Saat ini penggunaan rubrik mulai berkembang luas. Berbagai model rubrik dapat diperoleh dengan melakukan pencarian di laman (website) karena banyak institusi pendidikan dan staf pengajar yang menaruh rubrik mereka di sana. Berbagai model rubrik yang ada dapat dipelajari dengan membandingkan sebuah rubrik dengan rubrik lainnya sehingga menginspirasi ide-ide contoh dimensi dan tolok ukur yang selanjutnya diadaptasi sesuai dengan tujuan pembelajaran (jika menggunakan atau mengadaptasi rubrik dosen lain, jangan lupa untuk meminta izin kepada penulis aslinya).

8.3.2 Menetapkan Dimensi

Setelah diketahui pokok-pokok pemikiran tentang tugas yang diberikan dan harapan terhadap hasil kerja mahasiswa, dapat disusun komponen rubrik yang penting, yaitu dimensi. Pembuatan dimensi dilakukan dalam beberapa tahap:

- (1) membuat daftar yang berisi harapan-harapan dosen dari tugas yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa;
- (2) menyusun daftar yang telah dibuat mulai dari harapan yang paling diinginkan;
- (3) meringkas daftar harapan, jika daftar harapan masih panjang, daftar dapat disederhanakan dengan cara menghilangkan elemen yang kurang penting atau menggabungkan elemen yang memiliki kesamaan;
- (4) mengelompokkan elemen tersebut berdasarkan hubungan yang satu dengan yang lainnya; jadi, setiap kelompok berisi elemen- elemen yang saling berhubungan;
- (5) memberi nama tiap-tiap kelompok dengan nama yang menggambarkan elemen-elemen di dalamnya; dan
- (6) memberikan nama-nama pada langkah di atas disebut dengan dimensi dan elemen-elemen di dalamnya menjadi deskripsi dimensi untuk skala tertinggi.

8.3.3 Menentukan Skala

Tingkat pencapaian hasil kerja mahasiswa untuk setiap dimensi ditunjukkan dengan skala penilaian. Jumlah skala yang dianjurkan sesuai dengan tingkat penilaian yang ada di program studi masing-masing, misalnya, penilaian sampai skala 5, yaitu *sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan sangat kurang*. Makin banyak skala yang dipergunakan makin tidak mudah membedakan tolok ukur setiap dimensi, sehingga dapat menimbulkan subjektif. Tingkat skala yang digunakan harus jelas dan relevan untuk dosen dan mahasiswa. Berikut beberapa contoh nama tingkat skala penilaian: (a) melebihi standar, memenuhi standar, mendekati standar, di bawah standar; (b) bukti yang lengkap, bukti cukup, bukti yang minimal, tidak ada bukti; (c) baik sekali, sangat baik, cukup, belum cukup; dan seterusnya. Apa pun nama yang digunakan pada setiap tingkat skala, dosen dan mahasiswa mengerti dengan jelas, skala yang mencerminkan hasil kerja mahasiswa yang dapat diterima.

8.3.4 Membuat Tolok Ukur pada Rubrik Deskriptif

Pada penyusunan rubrik deskriptif, setelah skala penilaian didefinisikan, langkah selanjutnya adalah membuat deskripsi dimensi (tolok ukur dimensi) untuk setiap skala. Tahap pembuatan tolok ukur dimensi:

- (1) membuat tolok ukur dimensi untuk skala tertinggi sudah dibuat sebelumnya, yaitu daftar yang telah dibuat saat pada proses pembuatan dimensi, dan daftar tersebut berupa harapan-harapan dosen pada tugas mahasiswa;
- (2) membuat tolok dimensi untuk skala terendah, yang pembuatannya mudah karena merupakan kebalikan tolok ukur dimensi untuk skala tertinggi;
- (3) membuat deskripsi dimensi untuk skala pertengahan.

Makin banyak skala yang digunakan makin sulit membedakan dan menyatakan secara tepat tolok ukur dimensi yang dapat dimasukkan dalam suatu skala nilai. Jika digunakan lebih dari tiga skala, tolok ukur dimensi yang dibuat terlebih dahulu adalah yang paling luar atau yang lebih dekat ke skala tertinggi atau terendah. Kemudian selangkah demi selangkah menuju ke bagian tengah.

Rubrik dan segala bentuk penilaiannya diharapkan dapat diketahui secara terbuka oleh mahasiswa pada awal semester. Oleh karena itu, pada saat proses perencanaan studi (pengisian KRS), semua perencanaan dan alat pembelajaran harus telah diterimakan pada mahasiswa. Hal itu dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa.

BAB IX

KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER

9.1 Pengantar

Kalau kita melihat sejarah pendidikan kita ke masa lampau, hal itu menunjukkan bahwa lama sekolah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kenaikan GDP (yang dapat diartikan sebagai daya saing). Peningkatan lama sekolah dari tahun 1960 - 2000 menunjukkan bahwa lama sekolah cukup signifikan, dari 1 tahun + pada tahun 1960, sampai dengan 7 tahun + pada tahun 2000, tetapi GDP yang diperoleh tidak cukup signifikan berkisar antara \$ US 500 – 2000.

Kenyataan sejarah di atas, mengingatkan kepada kita tentang mutu hasil pendidikan yang berdaya saing baik lokal, regional, maupun global. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi pada saat sekarang yang berkisar 18 %, yang akan ditingkatkan menjadi 25.11% pada tahun 2011, tentunya bukan hanya lama sekolah yang meningkat ataupun APK, melainkan bagaimana meningkatkan daya saing sehingga diharapkan mutu pendidikan akan meningkat.

Seperti telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, penelitian pengembangan sumber daya manusia (*human resources development*) salah satu pengguna lulusan dan peneliti lainnya dari berbagai negara menyimpulkan bahwa keberhasilan seorang pembelajar menerapkan capaian pembelajarannya di dalam kerja kehidupan profesionalnya 80% disebabkan *softskill* (termasuk perilaku yang berkarakter). Artinya, pelajaran yang diperoleh di kelas melalui kuliah atau *hard skill* hanya menyumbang 20% pada keberhasilan tersebut.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang dimaksud dengan ‘karakter’ dan bagaimana cara penyampaiannya di dalam kuliah, yang disebut pendidikan karakter. Kutipan tentang pentingnya pendidikan karakter bagi kita, yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro.... “...pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya **budi pekerti (kekuatan batin, karakter)**, pikiran (*intellect*), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu **tidak boleh dipisahkan** agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita..” (*Ki Hajar Dewantoro*)

9.2 Karakter

Karakter adalah nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah

pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.

9.3 Pembangunan Karakter Bangsa

Pembangunan karakter bangsa adalah upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan karakter bangsa dilakukan secara koheren melalui proses sosialisasi, pendidikan dan pembelajaran, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerja sama seluruh komponen bangsa dan Negara. Nilai - nilai yang terkandung dalam perilaku seseorang yang berkarakter khas-baik digambarkan dalam ilustrasi di bawah ini.

9.4 Cara Penyampaian dalam Kuliah Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter yang diterapkan di perguruan tinggi, bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang baik dalam berperilaku yang berkarakter. Bagaimana nilai - nilai luhur yang terkandung dalam agama, UUD 45, Pancasila, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 serta teori pendidikan, psikologi, dan tata nilai. Pengalaman baik yang pernah dilakukan, pengetahuan sosial budaya yang diaplikasikan melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan sampai kepada pembiasaan, proses tersebut dilakukan melalui intervensi, mulai dari jalur satuan pendidikan, keluarga, dan akhirnya masyarakat. Untuk melaksanakan proses tersebut diperlukan perangkat pendukung, di antaranya kebijakan, pedoman, sumber daya, lingkungan, sarana dan prasarana, kebersamaan, komitmen pemangku kepentingan.

Pelaksanaan proses pendidikan karakter di perguruan tinggi, memuat pendidikan **nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak** yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan yang baik sehingga kita mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik, perasaan yang baik, dan perilaku yang baik sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup kita.

Penerapan pendidikan karakter di perguruan tinggi melalui kegiatan kurikuler yang ditata sedemikian rupa dalam bahan kajian, proses pembelajaran dan cara evaluasinya, dan juga melalui kegiatan ekstra dan ko-kurikuler dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan, olah raga, seni, penalaran, kewirausahaan, sosiopreneur, pemikiran kritis, dan bina desa. Keseluruhan dari kegiatan ini dikemas sedemikian rupa, sehingga kelak akan menjadi budaya akademik dalam menciptakan atmosfer akademik yang baik di kampus. Misalnya, pendidikan karakter di kampus tidak dapat disampaikan dengan cara pembelajaran secara kognitif, tetapi dikemas dalam proses pembelajaran melalui pemberian tugas pada mata kuliah, misalnya, tugas pencarian jejaring (*searching webs*) untuk menanamkan pola belajar sepanjang hayat, tugas kelapangan permukiman kumuh atau daerah tertinggal untuk mengasah dan membentuk "*learning to care*" dan rasa empati yang ditumbuhkan dari lingkungan yang dijadikan studi lapangan. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan, seyogyanya dosen berperan sangat penting sebagai model peran (*role model*) dalam disiplin, inisiatif, melakukan edifikasi, kepemimpinan, bertutur dan santun yang tidak dapat dilakukan melalui proses pembelajaran secara kognitif tetapi pembelajaran yang dikemas sebagai kurikulum terselubung (*hidden curriculum*).

Berikut ini pendidikan karakter yang diambil dari salah satu universitas yang berhasil menerapkannya yang dikemas ke dalam kegiatan kurikuler, ekstra dan ko-kurikuler serta memiliki proses pembelajaran.

a. Pengetahuan Akademik (*Academic Knowledge*)

Fasilitas yang paling utama di perguruan tinggi adalah tempat belajar, dosen, staf nondosen, laboratorium yang dapat digunakan sebagai wahana belajar untuk mengenal (*learning to know*), dan belajar untuk berbuat (*learning to do*) dengan bahan kajian, proses pembelajaran dan cara evaluasinya yang tidak hanya dari sisi akademis tetapi termasuk disisipkannya pendidikan karakter sebagai kurikulum terselubung.

b. Pembelajaran Alternatif (*Alternative Learning*)

Fasilitas untuk belajar hidup dalam lingkungan aktivitas mahasiswa (*student activities*) seperti Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), asrama mahasiswa disediakan untuk mengasah kemampuan bekerja sama, baik memimpin maupun menjadi anggota

c. Pembelajaran Kepemimpinan (*Leadership Learning*)

Wahana untuk belajar dan mengasah kemampuan mahasiswa menjadi pemimpin yang berkarakter baik seperti di UKM

d. Pembelajaran tempat kerja (*Workplace Learning*)

Wahana untuk belajar dan mengasah kemampuan mahasiswa di tempat kerja, Kerja Praktik Lapangan, Kerja Praktik Bengkel, *internship*, *mentorship* di lembaga terkait. Khusus kepedulian pada lingkungan diwujudkan dalam EfSD (*education for sustainable development*) atau di dunia lebih dikenal sebagai ESD, yang bertujuan untuk melestarikan bumi kita melalui pembangunan yang berkelanjutan, seperti, limbah zero (*zero waste*), hemat energi, dan industri hijau

e. Pembelajaran Kreativitas (*Creativity Learning*)

Wahana untuk menggali kreativitas dalam menjalankan profesinya diwujudkan melalui UKM, kelompok mahasiswa (*Student Club*) dalam bidang-bidang tertentu, seperti robotik, otomotif, informatika, dan bisnis

f. Pembelajaran untuk Melayani (*Learning to serve*)

Wahana untuk membangun karakter, bagaimana menjadi orang yg mampu, baik pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), maupun perilaku dalam melayani masyarakat yang membutuhkan.

g. Pembelajaran untuk Peka (*Learning to care*)

Wahana untuk membangun karakter mahasiswa dengan belajar dan mengasah empati, contoh baik, melalui kegiatan olah rasa, karsa, dan raga di klub musik, drama, seni, dansa dan olahraga

h. Pembelajaran Lintas Budaya (*Learning across cultures*)

Wahana untuk belajar mengenal ragam budaya dan pola pikir melalui pertukaran mahasiswa dan mengikuti kegiatan internasional dan kerja sama perguruan tinggi

BAB X

PENUTUP

Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi merupakan hak dari Perguruan tinggi masing-masing. Paduan ini memberikan kisi-kisi dan pemikiran untuk membantu perguruan tinggi dalam usaha mengembangkan kurikulumnya berdasarkan sudut tinjau berbagai aspek yang disusun oleh tim dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI. Dengan mempelajari panduan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memungkinkan dikritisi bahkan dikembangkan oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan pendidikan tinggi. Prinsip dalam belajar adalah berubah. Perubahan dari tidak paham menjadi sangat menguasai, dari belum trampil menjadi sangat cekatan, dari kurang mampu berkomunikasi secara santun menjadi komunikator yang efektif dan santun, dari belum sempurna menjadi lebih tertata dan sempurna, setelah melalui proses belajar. Seorang ahli pendidikan memberi saran, bila ingin mampu berenang berenanglah, bila ingin bisa bernyanyi, bernyanyilah. Oleh sebab itu untuk bisa mengembangkan kurikulum menurut pemikiran yang tercantum dalam panduan ini, maka kita harus melakukannya. Tetapi sebagai sebuah panduan, pemikiran ini tidak mengikat, terbuka, seperti konsep belajar itu sendiri yang bersifat merdeka.

Catatan akhir, bahwa usaha pembaharuan kearah yang lebih baik ditujukan pada peningkatan mutu anak didik sebagai generasi yang akan berperan dalam membangun bangsa dan negara di masa yang akan datang. Semoga usaha kita bisa berhasil dan mendapat berkah dan tuntunan dari Tuhan yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Beck, M. & Smith, R. 2005. Developing the Credit-Based Modular Curriculum in Higher Education: challenge choice and change. London: Falmer Press.
2. Dele H. Schunk, Learning Theories: An Education Perspective, sixth edition, Person, 2012
3. Delors, J. 1999. Education: The Necessary Utopia. In "Learning: The Treasure Within", Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty First Century. UNESCO Publishing. Bruce Joyce, Marsha Weil, "Model of Teaching", Prentice Hall, 2008
4. Isaacs, G. 1999. Assessment Criteria and Standard for Course Learning Goals. Teaching and Educational Development Institute, The University of Queensland.
5. John W. Santrock, "Educational Psychology", fifth edition, McGrawHill, 2011. Buscaglia, L. 2002. Living Loving Learning. New York: Ballantine Publishing Group
6. Jones J.Malcolm (ed). 2000, Curriullum Development, (EEDP), DIKTI.
7. Susan M. Brookhart, "Assess Higher-Order Thingking Skills in Your Classroom, Alexandria, Virginia USA, 2010

Peraturan :

1. Kepmen No 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmen no 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
3. Perpres no 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. UU no 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
5. UU Pendidikan Tinggi no 12 tahun 2012
6. PP no 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN:

1. **Lecture Notes: power point**
2. **Lembar Kerja**
3. **Selected Reading Material (daftar alamat web; buku; print out artikel; fotocopy)**